



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



#Uangkita yang sehat, adil, dan mandiri
untuk Indonesia Berdaulat

Scan untuk Unduh





“Kemiskinan 9,82 persen (per Maret 2018), pertama kali dibawah 10 persen, serta koefisien gini juga makin menurun dari 0,41 ke 0,38”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara penganugerahan Habibie Award Tahun 2018 di Jakarta



Angka realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 telah mencapai Rp1.483,86 triliun, dimana capaian tersebut adalah 78,32 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018



Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun merupakan realisasi penerimaan Pajak, sedangkan realisasi dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp144,14 triliun, atau masing-masing telah mencapai 71,39 persen dan 74,26 persen dari target penerimaan Pajak dan target penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada APBN 2018.



Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Oktober 2018 mencapai Rp 1.720,85 triliun (77,49 persen dari pagu APBN 2018), tumbuh 11,94 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Oktober 2018 telah mencapai Rp646,42 triliun atau 84,37 persen dari pagu APBN 2018.



Realisasi defisit APBN hingga Oktober 2018 sebesar Rp236,99 triliun atau sekitar 1,60 persen PDB.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan III tahun 2018 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,17 persen, melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang membaik dan memperlihatkan daya tahan perekonomian nasional terhadap gejolak perekonomian global. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mampu tumbuh tinggi dan menjadi pendorong pertumbuhan PDB. Konsumsi pemerintah juga tumbuh cukup tinggi selama Triwulan III tahun 2018 seiring dengan peningkatan kemampuan penyerapan anggaran belanja negara. Tingkat inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Disamping itu, menurunnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan mampu menopang stabilitas ekonomi.

Namun, risiko ketidakpastian situasi ekonomi dan keuangan global perlu tetap diwaspadai pemerintah. Kinerja perdagangan internasional diharapkan akan lebih baik pada Triwulan IV tahun 2018.

Angka realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 telah mencapai Rp1.483,86 triliun, dimana capaian tersebut adalah 78,32 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018. Berdasarkan jenis penerimaannya, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah berturut-turut sebesar Rp1.160,66 triliun, Rp315,44 triliun, dan Rp7,77 triliun atau telah mencapai 71,73 persen, 114,53 persen, dan 648,84 persen terhadap

target penerimaan masing-masing yang ditetapkan pada APBN 2018.

Dari sisi pertumbuhannya terhadap penerimaan pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBPN tumbuh berturut-turut sebesar 15,87 persen secara *year on year (yoy)* dan 34,52 persen (*yoy*).

Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun merupakan realisasi penerimaan Pajak, sedangkan realisasi dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp144,14 triliun, atau masing-masing telah mencapai 71,39 persen dan 74,26 persen dari target penerimaan Pajak dan target penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada APBN 2018.

Berdasarkan pola pertumbuhannya, realisasi penerimaan pajak tercatat tumbuh sebesar 16,25 persen (*yoy*), namun jika tidak memperhitungkan penerimaan dari uang tebusan *tax amnesty* pada tahun 2017 maka penerimaan pajak tercatat mampu tumbuh 17,87 persen (*yoy*). Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan pajak diantaranya yaitu masih terus tumbuhnya penerimaan PPh migas, PPh nonmigas, serta PPN dan PPnBM yang masih tumbuh penerimaannya. Selain itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang berasal dari Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) juga tercatat tetap tumbuh. **Komponen penerimaan tersebut mampu mendorong realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai secara keseluruhan tumbuh positif**

mencapai 13,30 persen (*yoy*).

Pertumbuhan penerimaan pajak per komponen penerimaannya menunjukkan bahwa penerimaan dari PPh nonmigas mampu terus tumbuh sebesar 17,03 persen (*yoy*), dimana komponen utama penerimaan PPh nonmigas, yang terdiri dari PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, PPh 25/29 OP, dan PPh Pasal 26, tercatat mampu terus tumbuh berturut-turut sebesar 27,72 persen (*yoy*), 25,21 persen (*yoy*), 21,00 persen (*yoy*), dan 26,54 persen (*yoy*). Faktor yang mendorong tumbuhnya penerimaan komponen utama PPh nonmigas tersebut antara lain masih tetap tumbuhnya aktivitas perdagangan internasional Indonesia dan kinerja positif sektor usaha industri, perdagangan, pertambangan, dan pertanian di dalam negeri. Lebih lanjut, pengaruh apresiasi nilai dollar Amerika terhadap rupiah yang masih terus berlangsung, juga menjadi salah satu faktor yang tidak langsung ikut mendorong pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas. **Selain itu, dari sisi penerimaan PPh migas tercatat tumbuh secara signifikan sebesar 28,06 persen (*yoy*),** dimana pertumbuhan penerimaan PPh migas tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor meningkatnya *Indonesian Crude Price (ICP)*.

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sebagai komponen penerimaan pajak yang lain tercatat tumbuh mencapai 14,96 persen (*yoy*). Masih tingginya aktivitas impor dan tetap tumbuhnya konsumsi dalam negeri, masih menjadi

faktor pendorong pertumbuhan penerimaan PPN Impor dan PPN DN, dimana masing-masing tumbuh 28,10 persen (yoy) dan 8,94 persen (yoy). Sedangkan, pertumbuhan penerimaan PPnBM DN masih negatif 3,96 persen (yoy), namun sedikit lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan penerimaan pada periode bulan sebelumnya sebesar negatif 5,96 persen (yoy). Untuk PPnBM Impor, realisasi penerimaannya sudah mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen (yoy).

Tren positif pertumbuhan penerimaan juga masih ditunjukkan oleh komponen penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dimana realisasi penerimaan dari Cukai tercatat masih tumbuh sebesar 10,36 persen (yoy), penerimaan BM tumbuh mencapai 15,66 persen (yoy), dan penerimaan BK tetap tumbuh mencapai 83,20 persen (yoy). Faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan Kepabeanan dan Cukai diantaranya yaitu peningkatan aktivitas perdagangan internasional, dampak positif kebijakan Kepabeanan dan Cukai melalui program PIBT dan PCBT, serta peningkatan harga komoditas internasional.

Pertumbuhan komponen realisasi penerimaan Cukai dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai 9,88 persen (yoy). Penerimaan CHT pertumbuhannya didukung oleh faktor meningkatnya produksi Hasil Tembakau (HT) yang merupakan

dampak positif kebijakan program pemberantasan peredaran rokok illegal. Lebih lanjut, kenaikan tarif efektif cukai pada produk HT yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata tarifnya di 2018 juga mendorong pertumbuhan penerimaan CHT. Sementara itu, realisasi penerimaan dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih tercatat tumbuh paling tinggi dalam komponen penerimaan Cukai yaitu mencapai 15,80 persen (yoy).

Hingga akhir Oktober 2018, faktor peningkatan aktivitas impor serta dampak positif program PIBT masih menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan BM, melanjutkan tren positif periode sebelumnya. Pertumbuhan impor yang masih didominasi oleh aktivitas impor dari sektor industri pengolahan (manufaktur) menunjukkan indikasi industri dalam negeri yang masih terus terjaga pertumbuhannya. Di sisi yang lain, peningkatan aktivitas ekspor minerba akibat relatif stabilnya harga komoditas mineral dan masih tingginya permintaan dari mitra dagang Indonesia, tetap menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan positif penerimaan BK hingga akhir Oktober 2018.

Pada akhir Oktober 2018, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp315,44 triliun atau 114,5 persen dari target APBN 2018. Realisasi PNBP bulan ini tumbuh sebesar 34,5 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP pada Oktober

2017. Kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-Oktober 2018 yang terus berlanjut menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan penerimaan PNBPN. Realisasi Penerimaan PNBPN SDA pada periode ini mencapai Rp142,03 triliun dengan pertumbuhan mencapai 72,6 persen (yoy). Penerimaan PNBPN SDA ini terutama didukung oleh realisasi penerimaan SDA migas yang mencapai Rp112,2 triliun yang tumbuh 91,4 persen (yoy). Peningkatan penerimaan SDA secara umum dan migas secara khusus ini disebabkan oleh tren peningkatan ICP. Rata-rata ICP hingga akhir Oktober 2018 sebesar USD69,18 per barel, dimana lebih tinggi sebesar USD49,38 per barel pada periode yang sama tahun 2017.

Di sisi lain, realisasi penerimaan PNBPN SDA Non Migas pada Oktober 2018 telah mencapai Rp29,84 triliun atau sebesar 127,9 persen dari target APBN 2018 yang tumbuh sebesar 26,2 persen (yoy). Peningkatan realisasi penerimaan PNBPN SDA Non Migas ini salah satunya dipicu oleh peningkatan kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari-Oktober 2018 yang mencapai USD99,72 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar USD84,22 per ton.

Sementara itu, Penerimaan PNBPN dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan telah mencapai 42,47 triliun pada Oktober 2018 atau sebesar 95,0 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh sebesar 3,14 persen

(yoy). Di sisi penerimaan PNBPN Lainnya, pada bulan Oktober 2018 telah mencapai 88,31 triliun atau sebesar 105,4 persen dari target APBN 2018 serta mengalami pertumbuhan 17,16 persen (yoy). Di sisi lain, penerimaan PNBPN Pendapatan BLU hingga Oktober 2018 telah mencapai 42,63 triliun atau sebesar 98,4 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 19,53 persen (yoy).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Oktober 2018 mencapai Rp 1.720,85 triliun (77,5 persen dari pagu APBN 2018), tumbuh 11,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi

Belanja Negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.074,43 triliun (73,9 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 646,42 triliun (84,4 persen dari pagu APBN). Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan penyerapan anggaran yang lebih optimal agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari belanja yang dilakukan Pemerintah. Upaya perbaikan tersebut tercermin antara lain dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Oktober 2018 yang tumbuh 19,6 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial (bansos) yang telah mencapai Rp69,14 triliun (tumbuh 47,8 persen) dan Subsidi yang mencapai Rp160,36 triliun (tumbuh 56,2 persen). Membaiknya kinerja belanja bansos dan subsidi tersebut

menunjukkan komitmen Pemerintah yang senantiasa melindungi masyarakat miskin dan rentan dengan menjaga daya beli mereka di tengah ketidakpastian perekonomian dunia.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Oktober 2018 mencapai Rp160,36 triliun atau 102,64 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp117,37 triliun dan subsidi non energi Rp42,99 triliun. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Oktober 2018 lebih besar Rp57,70 triliun atau 56,20 persen dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2017. Lebih tingginya realisasi belanja subsidi sampai dengan bulan Oktober 2018 tersebut terutama disebabkan oleh realisasi belanja subsidi energi yang dipengaruhi pergerakan ICP dan nilai tukar rupiah, serta pembayaran sebagian kurang bayar belanja subsidi pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menjaga *good governance* dan kinerja keuangan BUMN. Pemerintah akan secara konsisten melakukan pengelolaan belanja subsidi yang sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, dengan tetap memperhatikan realisasi asumsi ekonomi makro APBN dan kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Oktober 2018 telah mencapai Rp646,42 triliun atau 84,4 persen dari pagu APBN 2018. Capaian

realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp601,99 triliun (85,2 persen dari pagu) dan Dana Desa Rp44,43 triliun (74,0 persen dari pagu). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp578,79 triliun (85,5 persen dari pagu), Dana Insentif Daerah (DID) Rp8,07 triliun (95,0 persen dari pagu), serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp15,12 triliun (71,8 persen dari pagu). Realisasi TKD sampai dengan Oktober 2018 tersebut lebih tinggi Rp10,68 triliun atau sekitar 1,8 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Oktober 2018 tersebut terutama disebabkan karena: (1) Peningkatan realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) sebesar 6,9 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya, karena proses penyaluran dana hingga awal triwulan IV yang relatif lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya; serta (2) Realisasi DAU yang lebih tinggi 0,7 persen dibandingkan periode sebelumnya karena penyaluran DAU yang cukup meningkat pada awal triwulan IV tahun 2018. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Oktober 2018 lebih rendah Rp3,09 triliun (6,5 persen dari pagu) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh lambannya realisasi penyerapan Dana Desa hingga awal triwulan IV 2018 karena keterlambatan beberapa desa dalam memenuhi beberapa persyaratan dokumen penyaluran Dana Desa.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2018 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Oktober 2018 mencapai Rp236,99 triliun atau sekitar 1,60 persen PDB.

Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode yang sama tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Selain itu, posisi keseimbangan primer hingga Oktober 2018 berada pada posisi negatif Rp23,76 triliun, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai negatif Rp115,22 triliun. Pemerintah terus mengupayakan keseimbangan primer menuju positif. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Oktober 2018 mencapai Rp320,0 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp333,72 triliun, atau mencapai 83,6 persen dari APBN

2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp343,23 triliun atau mencapai 82,8 persen dari APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp9,51 triliun atau sekitar 62,1 persen dari rencana Pemerintah di tahun 2018. Posisi pinjaman yang negatif tersebut mengindikasikan bahwa pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan Pemerintah lebih tinggi dari penarikan pinjaman. Selain itu, pembiayaan utang juga menunjukkan tren yang menurun apabila dibandingkan dengan realisasi Oktober 2017, yaitu turun sebesar 19,5 persen (yoy). Pemerintah tetap menjaga pengelolaan utang dilakukan secara *prudent* dan produktif yang antara lain dilakukan dengan strategi menjaga rasio utang tetap terkendali dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan yang lebih produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

REALISASI APBN 2018 s/d 31 OKTOBER 2018

	APBN 2018	Realisasi s.d. 31 Okt	% thd APBN
 PENDAPATAN NEGARA (A)	1,894,720.4	1,483,862.1	78.32%
 BELANJA NEGARA (B)	2,220,657.0	1,720,847.8	77.49%
 KESEIMBANGAN PRIMER	(87,329.5)	(23,764.0)	27.21%
 SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,936.6)	(236,985.7)	
 PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,936.6	320,007.1	98.18%

dalam miliar Rupiah

Realisasi APBN sampai dengan akhir Oktober Tahun 2018

Perkembangan APBN tahun 2018 sampai dengan periode 31 Oktober 2018 menunjukkan capaian yang sangat positif pada semua komponen serta konsisten sejak awal tahun. Pendapatan negara dan belanja negara secara bersamaan mampu memberikan capaian yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dan defisit terjaga lebih rendah.

Rasio defisit anggaran terjaga pada 1,60 persen terhadap PDB yang merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama, sedangkan defisit keseimbangan primer sebesar 0,85 persen terhadap PDB menjadi yang terendah sejak tahun 2013. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat, realistis, dan kredibel.

Realisasi pendapatan negara tumbuh 19,76 persen (yoy) yang mencapai Rp1.483,86 triliun atau 78,32 persen dari target dalam APBN tahun 2018 atau, lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai Rp1.239,03 triliun atau 71,37 persen dari target. Rincian realisasi pendapatan negara sebagai berikut:

- a. Laju realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 15,87 persen (yoy) atau mencapai Rp1.160,66 triliun atau 71,73 persen dari target APBN 2018, terutama bersumber dari:
 - Penerimaan Pajak yang tumbuh sebesar 16,25 persen (yoy) dengan capaian sebesar Rp 1.016,52 triliun atau 71,39 persen dari target APBN tahun 2018.
 - Penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 13,27 persen (yoy) dengan capaian sebesar Rp144,14 triliun atau 74,26 persen dari target APBN tahun 2018.
- b. Pertumbuhan realisasi PNPB juga menunjukkan nilai yang signifikan dan sangat positif sebesar 34,52 persen (yoy) yang mampu membukukan nilai realisasi sebesar Rp 315,44 triliun atau 114,53 persen dari target APBN tahun 2018.
- c. Sementara itu penerimaan hibah juga mengalami peningkatan sebesar 170,63 persen (yoy) dengan nilai nominal Rp7,77 triliun atau 648,84 persen dari target APBN Tahun 2018, meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp2,87 triliun atau 92,32 persen dari target APBN.

Selanjutnya, untuk kinerja penyerapan belanja negara meningkat 11,94 persen (yoy) yang mencapai Rp1.720,85 triliun atau 77,49 persen dari pagu APBN 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pemerintah pusat tumbuh 19,58 persen (yoy), dengan capaian Rp1.074,43 triliun atau 73,87 persen dari pagu. Kontribusi belanja negara ini didukung oleh :
 - belanja K/L yang meningkat sebesar 14,66 persen (yoy) dengan nominal Rp586,37 triliun atau 69,19 persen dari pagu ;
 - belanja Non K/L naik 26,08 persen (yoy) yang mencapai Rp488,06 triliun atau 80,40 persen dari pagu.
- b. Sedangkan TKDD tumbuh sebesar 1,19 persen (yoy) dengan capaian Rp646,42 triliun atau 84,37 persen dari pagu APBN tahun 2018, diantaranya adalah :
 - Transfer ke Daerah meningkat sebesar 1,81 persen (yoy) dengan nominal Rp601,99 triliun atau 85,25 persen dari pagu.
 - Dana Desa sedikit mengalami penurunan sebesar 6,51 persen (yoy) dengan capaian Rp44,43 triliun atau 74,05 persen dari pagu.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara di atas, maka realisasi defisit anggaran sebesar Rp236,99 triliun dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp23,76 triliun, menurun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni Rp298,33 triliun dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp115,22 triliun. Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp320,01 triliun termasuk untuk pembiayaan investasi sebesar Rp14,71 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp83,02 triliun. Melihat gambaran fiskal tersebut, maka pelaksanaan APBN tahun 2018 secara garis besar masih *on the track*.

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian nasional pada Triwulan III tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,17 persen (yoy) lebih tinggi dari pada Triwulan III tahun 2017 sebesar 5,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi Triwulan III tahun 2018 didorong oleh pertumbuhan PMTB dan konsumsi pemerintah, yang tumbuh masing-masing sebesar 6,96 persen (yoy) dan 6,28 persen (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan perbaikan pengelolaan belanja negara dalam APBN tahun 2018. Namun, sektor luar negeri atau net ekspor mengalami defisit yang cukup dalam karena pertumbuhan impor yang cukup tinggi dibandingkan peningkatan ekspor. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 9,19 persen (yoy), informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,98 persen (yoy), dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 8,67 persen (yoy).

Masih tingginya defisit pada impor migas dan jasa meningkatkan pelebaran defisit transaksi berjalan pada triwulan III tahun 2018.

Defisit Transaksi Berjalan tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap PDB. Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan ini dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Penurunan kinerja neraca perdagangan barang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas sejalan dengan masih tingginya permintaan domestik. Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas mengalami surplus yang terutama didukung oleh tumbuhnya ekspor sektor manufaktur meskipun mengalami penurunan porsi kontribusi seiring dengan peningkatan nilai ekspor sektor pertambangan. Sementara itu, meningkatnya defisit neraca jasa terutama bersumber dari naiknya jasa transportasi ke luar negeri, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Disisi lain, transaksi modal dan finansial mengalami surplus USD4,2 miliar, didukung terutama oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung. Selain itu, aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara dan pinjaman

luar negeri korporasi juga meningkat. Namun demikian, surplus transaksi modal dan finansial belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2018 mengalami defisit sebesar USD4,4 miliar.

Pada bulan Oktober, inflasi tercatat sebesar 0,28 persen, dimana 2 bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dan 0,18 persen. Sehingga, sampai dengan bulan Oktober 2018, inflasi mencapai 2,2 persen (ytd) atau 3,16 persen (yoy), yang menggambarkan stabilitas ekonomi nasional masih tetap terjaga. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang mencapai 2,64 persen (ytd) atau 3,58 persen (yoy). Terjaganya tingkat inflasi ini didukung oleh melimpahnya pasokan komoditas hortikultura (aneka bawang, cabai, dan sayuran) serta normalisasi permintaan tarif angkutan udara setelah libur lebaran. Dengan pencapaian laju inflasi hingga Oktober 2018, Pemerintah optimis bahwa target inflasi tahun 2018 sebesar 3,5 persen dapat tercapai.

Namun, Pemerintah tetap mewaspadai risiko-risiko yang berpotensi meningkatkan laju inflasi, seperti faktor depresiasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan karena faktor pergantian musim, serta peningkatan permintaan di akhir tahun (Natal dan Liburan).

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akhir-akhir ini mengalami penurunan dan per 8 November tercatat pada level Rp14.651,0 per dolar Amerika Serikat, atau terdepresiasi sebesar 8,19 persen (ytd). Kondisi eksternal yang mempengaruhi *risk appetite* mendorong penguatan posisi nilai tukar Rupiah. Kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah telah memberikan perbaikan kinerja ekonomi nasional yang juga memberikan sentimen positif terhadap persepsi investor. Kondisi tersebut juga mendorong *capital inflow* yang signifikan, khususnya di SUN yang menambah pasokan valas di pasar domestik. Pada akhir Oktober 2018, posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD115,2 miliar, meningkat sebesar

USD0,4 miliar dibandingkan dengan posisi akhir September 2018 sebesar USD114,8 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, atau jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selanjutnya, kondisi tekanan nilai tukar Rupiah yang mereda tersebut berimbas pada penurunan rata-rata tingkat SPN 3 bulan dimana pada lelang terakhir (6 November 2018), yield yang dimenangkan sebesar 5,76 persen, lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya (23 Oktober 2018) sebesar 5,81 persen, sehingga rata-rata yield selama Januari-November 2018 tercatat sebesar 4,34 persen.

Indikator ketenagakerjaan memperlihatkan kinerja yang membaik, ditandai oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus tahun 2018 menjadi 5,34 persen, sesuai dengan target pembangunan tahun 2018 pada kisaran 5,0-5,3 persen.

Pengangguran berkurang sebesar 40 ribu orang atau turun dari 5,5 persen di Agustus 2017 menjadi 5,34 persen di Agustus tahun 2018, dimana secara relatif TPT untuk SMK masih mendominasi di antara pendidikan lain selama beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 11,24 persen. Jumlah

angkatan kerja pada Agustus tahun 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding tahun lalu, dengan TPAK meningkat sebesar 0,59 persen poin menjadi 67,26 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang dibanding periode sama tahun lalu. Sektor yang mengalami peningkatan persentase lapangan pekerjaan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan, dan Transportasi. Sebaliknya sektor yang mengalami penurunan adalah Pertanian, Jasa Lainnya, dan Jasa Pendidikan.

Kedepan, Pemerintah akan terus berupaya mengantisipasi risiko-risiko yang ada dan memperkuat fundamental ekonomi.

Penguatan posisi Transaksi Berjalan tetap akan memperoleh perhatian yang besar. Koordinasi akan terus diperkuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menekan impor guna mengendalikan defisit transaksi berjalan berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Perbaikan struktural di sector riil juga tetap diperlukan untuk meningkatkan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Foto:
Media Keuangan

APBN 2019: Menjaga Kemandirian dan Keseimbangan Fiskal, Meningkatkan Daya Saing Bangsa dan SDM

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA.) 2019 menjadi undang-undang. APBN TA pada tanggal 31 Oktober 2018 setelah melewati agenda pembahasan pasca penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2019 pada tanggal 16 Agustus 2018. Kesepakatan tersebut memberikan kepastian akan besaran asumsi dasar ekonomi makro dan besaran APBN yang akan menjadi instrumen fiskal pada

tahun 2019. Selain itu, APBN disusun juga sebagai instrumen keadilan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan wilayah. Dari sisi kemandirian APBN TA. 2019 salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara yang tumbuh secara signifikan.

Beberapa poin penting dalam pembahasan APBN 2019 sebagai berikut.

Indikator	2019	
	RAPBN	APBN
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3	5,3
b. Inflasi (% yoy)	3,5	3,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	5,3
d. Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	15.000
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70	70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	750	775
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1250	1250

Perubahan Asumsi Nilai tukar menjadi lebih realistis

APBN TA 2019 disusun secara seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak menuju keseimbangan baru dan prospek ke depan. Oleh karena itu, nilai tukar rupiah disepakati menjadi **Rp15.000/USD** untuk menyesuaikan dengan perubahan sentimen global yang sangat cepat dan mempengaruhi arus modal di negara *emerging market*.

Selain itu, target lifting minyak disepakati menjadi 775 ribu barel/hari guna mengoptimalkan kapasitas produksi.

Selain itu, terdapat perubahan pada cost recovery menjadi 10,22 miliar USD (semula 11,3 miliar USD).

Peningkatan Pendapatan Negara sebagai wujud Kemandirian

Target pendapatan negara di tahun 2019 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menjaga iklim investasi yang sehat, diantaranya sebagai berikut:

- **Penerimaan perpajakan**

Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat Rp5,4 triliun dari RAPBN 2019

(berkontribusi 82,5 persen terhadap Pendapatan Negara) dengan tax ratio dalam arti luas sekitar 12,2 persen. Selain menjadi sumber utama penerimaan negara, pajak akan diarahkan untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing. Target Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai tahun 2019 sebesar Rp208,8 triliun seiring perbaikan kinerja perdagangan dan meningkatnya harga komoditas.

Strategi dan kebijakan perpajakan tahun 2019 adalah dengan melakukan penggalan sumber pendapatan negara dengan tetap mendukung iklim investasi dan daya saing ekspor, serta mendorong tingkat kepatuhan melalui reformasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Di bidang Kepabeanaan dan Cukai, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan serta pemberantasan penyelundupan.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan Rp378,3 triliun atau tumbuh 8,3 persen dari *outlook*

APBN tahun 2018, didorong adanya peningkatan kualitas dan volume layanan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kontribusi PNBP dari sumber daya alam. Kebijakan PNBP tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan aset.

Fokus belanja pemerintah pusat

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp1.634,3 triliun (meningkat Rp27,0 triliun dari usulan RAPBN tahun 2019). Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian /Lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.

Belanja K/L tahun 2019 sebesar Rp855,4 triliun diarahkan untuk Peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memperkuat PIP, BOS, beasiswa, vokasi, dan

mempercepat rehab sekolah; Penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan JKN, serta peningkatan besaran manfaat PKH; Menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan; Memperkuat reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi; Mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, dan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Pengalokasian anggaran belanja K/L dilakukan dengan memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja (value for money) melalui peningkatan kualitas aparatur negara, pengendalian belanja barang, optimalisasi pemanfaatan belanja modal, dan penguatan bantuan sosial. Peningkatan kualitas aparatur negara dilakukan antara lain dengan menyeimbangkan penambahan aparatur negara dan mempertahankan penghasilan aparatur negara dan pensiunan dengan tetap memberikan penghasilan/pensiun-13, pemberian THR, serta kenaikan gaji/pensiun pokok rata-rata 5 persen. Sementara itu, pengendalian belanja barang dilakukan dengan mendukung penguatan belanja barang produktif dan melanjutkan efisiensi belanja barang non produktif, dan

melakukan penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemda termasuk pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Optimalisasi pemanfaatan belanja modal dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan infrastruktur transportasi dasar pada kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, dan pengembangan destinasi wilayah baru, dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan meningkatkan keterlibatan peran swasta dalam proses pembangunan. Penguatan bantuan sosial antara lain dilakukan dengan meningkatkan sinergi program-program bantuan sosial, menggunakan Basis Data Terpadu untuk ketepatan sasaran, mendorong efektivitas dan penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara lain perluasan kepesertaan, mendorong efektivitas PKH melalui peningkatan manfaat dan perbaikan penyaluran, penguatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Anggaran Infrastruktur

Besaran anggaran infrastruktur dalam APBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp415,0 triliun yang terdiri dari infrastruktur ekonomi

sebesar Rp399,1 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp10,7 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasinya dalam APBN tahun 2018. Lebih tingginya anggaran infrastruktur dalam APBN Tahun 2019 tersebut, secara umum disebabkan a.l. oleh: (1) kebijakan efisiensi belanja K/L untuk diarahkan kepada belanja yang lebih produktif, termasuk pembangunan infrastruktur, dan (2) meningkatnya alokasi dana alokasi khusus untuk bidang infrastruktur. Dengan peningkatan anggaran infrastruktur tersebut, diharapkan target-target pembangunan infrastruktur, terutama yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dapat terwujud.

Anggaran pendidikan

Anggaran Pendidikan pada APBN tahun 2019 sebesar Rp492,5 triliun diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Sebesar Rp163,1 triliun merupakan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, Rp308,4 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Rp21,0 triliun melalui pengeluaran pembiayaan. Peningkatan kualitas dan perbaikan akses dilakukan melalui peningkatan efektivitas BOS melalui

BOS berdasarkan kinerja dan afirmasi, kelanjutan program Indonesia Pintar diikuti peningkatan ketepatan sasaran, percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan Kementerian PUPR dan DAK disupervisi Kementerian PUPR), perluasan program beasiswa afirmasi/ bidik misi, enforcement pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda, dan penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan link and match dengan industri. Selain itu pada APBN 2019 mulai dialokasikan dana abadi penelitian.

Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp123,1 triliun yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,8 triliun serta melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp33,4 triliun. Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan perbaikan akses antara lain melalui perluasan penerima bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional, perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan percepatan penanganan stunting

melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten/kota, dan melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan pengendalian defisit BPJS kesehatan.

Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dengan pelaksanaan program PIP dan Bidikmisi, melakukan perluasan cakupan kepesertaan segmen PBI menjadi 96,8 juta jiwa, peningkatan indeks bantuan PKH bagi 10 juta KPM, dan penguatan bantuan pangan non tunai bagi 15,6 juta KPM, serta mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, baik melalui skema transfer risiko maupun memperkuat skema APBN dengan melanjutkan skema asuransi yang telah ada (asuransi pertanian dan asuransi nelayan), dan melakukan piloting untuk Asuransi Barang Milik Negara, serta membentuk dana penanggulangan bencana alam yang dikelola khusus (pooling fund), untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.

Penguatan Kepastian dan Kebijakan Transfer ke Daerah dan dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun atau lebih rendah Rp5,6 triliun dari RAPBN

2019. Pengalokasian TKDD tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan belanja K/L dan diarahkan untuk dikelola berdasarkan prinsip *value for money* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, sekaligus mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Beberapa poin penting sebagai berikut:

- **Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD,** karena minimal 25 persen dari DAU sebagai bagian dari Dana Transfer Umum harus digunakan untuk belanja infrastruktur. Pengalokasian DAU telah memperhitungkan rata-rata kenaikan gaji pokok 5 persen, gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Formasi CPNS Daerah.

Dalam DAU termasuk alokasi
Dalam DAU termasuk alokasi DAU tambahan untuk pendanaan kelurahan sebesar Rp3,0 triliun yang ditujukan bagi 8.212 kelurahan di seluruh kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun telah ada DAU tambahan tersebut, namun Pemda diminta untuk tetap mempunyai komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik fokus pada pembangunan SDM dan Infrastruktur,

terutama melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas (bidang pendidikan), pembangunan dan rehabilitasi rumah sarana kesehatan dan penyediaan Puskesmas keliling (bidang kesehatan), pembangunan/pemeliharaan/peningkatan jalan dan jembatan, penyediaan jaringan air minum, sarana air limbah dan sampah, pembangu/rehabilitasi irigasi, dan pembangunan perumahan (bidang infrastruktur dasar). Selain itu terdapat penambahan subbidang baru, yaitu GOR dan perpustakaan daerah. Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan nasional.

- **DAK Non Fisik untuk perbaikan kualitas kinerja,** terutama melalui BOS berbasis kinerja dan peningkatan *unit cost* BOS untuk Pendidikan Vokasi. Penambahan jenis DAK Nonfisik baru, yaitu bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk kesetaraan, BOP untuk museum dan tamanbudaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).
- **Dana Desa dioptimalkan pemanfaatannya** untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan

pembangunan antardesa, sesuai kebutuhan dan prioritas desa, melalui penyempurnaan pola padat karya tunai (*cash for work*), penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, penguatan kapasitas SDM desa dan tenaga pendamping desa, dan penguatan *monitoring*, evaluasi dan pengawasan.

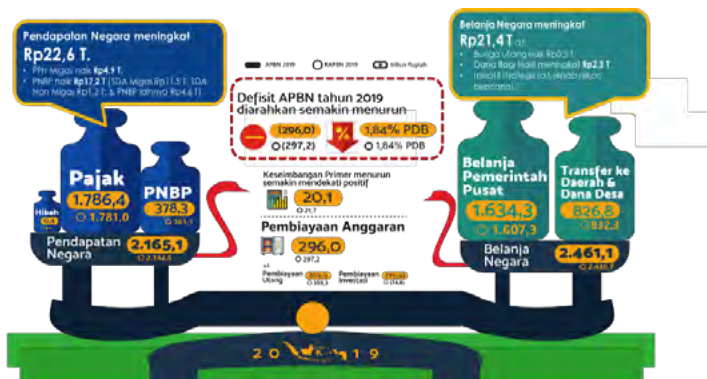
Defisit Terjaga dan Pembiayaan Utang Turun

Defisit APBN Tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp296,0 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB (sama dengan defisit RAPBN tahun 2019). Defisit ini lebih rendah dari outlook 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau sebesar 314,2 triliun. Defisit yang dijaga lebih rendah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal, disertai dengan rencana penarikan utang yang semakin menurun dan secara terukur, dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standar internasional.

Upaya menjaga keberlanjutan fiskal

juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp20,1 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2018. Defisit keseimbangan primer yang konsisten turun menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini yang terendah sejak tahun 2013.

Upaya menutup defisit tersebut, melalui berbagai sumber pembiayaan, terutama: (1) pembiayaan utang, termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperuntukkan langsung untuk membiayai proyek infrastruktur dengan nilai yang semakin meningkat dan (2) Pembiayaan Investasi tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan daya saing ekspor serta meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional, termasuk dana abadi penelitian untuk meningkatkan kegiatan penelitian yang akan mendorong peningkatan daya saing.





Tim Penilai dari
KPKNL Jayapura
menyusuri sungai
guna Revaluasi Aset
di Bouvendigoel,
Papua

Foto:
Media Keuangan

Revaluasi Aset: Mengejar Tuntas yang Berkualitas

Revaluasi aset tahun 2017-2018 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 29 Agustus 2017 lalu telah selesai dalam kurun waktu satu tahun (per 31 Agustus 2018). Sebanyak 931.649 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) aset telah dinilai ulang dengan nilai wajar meningkat menjadi Rp5.709,19 triliun dari nilai sebelumnya Rp1.530,91 triliun (kenaikan sebesar 272,93%).

“Nilai aset yang *reliable* dan laporan keuangan pemerintah pusat yang mencerminkan kondisi wajar merupakan bentuk perwujudan *good governance*.” – Sri Mulyani Indrawati

Revaluasi aset pemerintah pusat pertama kali dilakukan tahun 2007. Satu dasawarsa kemudian, revaluasi aset dilaksanakan kembali dengan

tujuan untuk menyajikan nilai aset pemerintah yang wajar dan realistis. Berbeda dengan revaluasi aset 2007 yang dilaksanakan terhadap seluruh jenis Barang Milik negara (BMN), revaluasi aset 2017-2018 ini hanya dilaksanakan atas 3 kelompok aset berupa: (1) tanah; (2) gedung dan bangunan; serta (3) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air. Ketiga kelompok aset ini memiliki proporsi nilai yang besar pada neraca pemerintah pusat, sehingga potensi kenaikan nilainya signifikan bila dilakukan penilaian kembali. Sebagian dari aset-aset tersebut juga memiliki peran penting dalam pembiayaan APBN, yaitu sebagai *underlying asset* dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Aset yang menjadi target revaluasi tersebar pada 13.787 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga

(K/L). Tiga K/L dengan objek revaluasi terbanyak yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan objek revaluasi sebanyak 354.348 NUP (38,03%),

diikuti oleh Kementerian Pertahanan dengan 159.404 NUP (17,11%), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 74.049 NUP (7,95%).

No	Kementerian/Lembaga		Capaian Jumlah NUP	%
	BA	Uraian		
1	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	354.348	38,03%
2	012	Kementerian Pertahanan	159.404	17,11%
3	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	74.049	7,95%
4	025	Kementerian Agama	62.457	6,70%
5	022	Kementerian Perhubungan	60.933	6,54%
6	018	Kementerian Pertanian	38.934	4,18%
7	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	21.901	2,35%
8	015	Kementerian Keuangan	20.408	2,19%
9	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	19.060	2,05%
10	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.010	1,40%
11		K/L Lainnya	107.145	11,50%
TOTAL	931.649	100%		

Rangkaian kegiatan revaluasi aset menghasilkan kenaikan nilai wajar aset pemerintah yang pada akhirnya juga turut meningkatkan performa laporan keuangan pemerintah. Bila dirinci berdasarkan tahun pelaksanaan revaluasi, pada 2017 terdapat kenaikan nilai aset sekitar Rp1.910,55 triliun dan sebesar Rp2.267,73 triliun pada 2018.

Menurut data, tiga K/L dengan kenaikan nilai tertinggi yaitu Kementerian Pertahanan dengan kenaikan nilai sebesar 393%

(Rp1.238,08 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kenaikan nilai sebesar 179% (Rp1.117,81 triliun), serta Kementerian Sekretariat Negara dengan kenaikan nilai sebesar 532% (Rp474,98 triliun).

Di antara aset yang mengalami kenaikan nilai wajar, terdapat BMN yang disiapkan sebagai *underlying asset* SBSN (sukuk). Semula, nilai buku aset tersebut tercatat sebesar Rp259,9T. Setelah revaluasi, kini nilai wajarnya menjadi Rp728,8T.

No	Kementerian/Lembaga		Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan/ Penurunan
	BA	Uraian			
1	012	Kementerian Pertahanan	314,686	1.552,774	1.238,088
2	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe- rumahan Rakyat	624,908	1.742,722	1.117,813
3	007	Kementerian Sekretariat Negara	89,223	564,204	474,981
4	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	72,783	363,085	290,301
5	022	Kementerian Perhubungan	109,869	399,532	289,662
6	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,690	227,063	176,373
7	015	Kementerian Keuangan	29,625	105,796	76,171
8	018	Kementerian Pertanian	14,285	84,856	70,570
9	025	Kementerian Agama	31,438	84,571	53,133

Selain menghasilkan kenaikan nilai wajar aset pemerintah, kegiatan revaluasi BMN juga turut meningkatkan kualitas pengelolaan BMN melalui pemutakhiran basis data BMN. Dari kegiatan ini dapat dipetakan kondisi aset, status hukum, status penggunaan, eksistensi, hingga koordinat lokasi aset. Dengan basis data BMN yang mutakhir, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan BMN serta menciptakan *cost saving* sebagai inisiatif efisiensi belanja pemeliharaan.

Dari kegiatan ini dapat diidentifikasi pula aset-aset yang belum optimal terutilisasi, terdiri dari 315 NUP tanah,

342 NUP bangunan, dan 119 NUP jalan, jembatan, bangunan air. Aset ini dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan gedung pemerintah, dan juga mendukung program kebijakan pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur dan rumah negara. Terpenuhinya kebutuhan ini berarti penghematan belanja modal bagi pemerintah.

Secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyelesaian revaluasi aset 2017-2018 ini, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah SDM di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diatasi dengan bantuan tenaga penilai dari Kanwil DJKN yang masih memiliki ketersediaan SDM dan juga dari Kantor Pusat DJKN. Total tim penilai yang diturunkan untuk menyelesaikan revaluasi aset ini mencapai lebih dari 300 tim.

Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM pada satuan kerja mitra KPKNL pun merupakan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan revaluasi. Hal ini sangat penting bagi kualitas pelaksanaan revaluasi, karena proses revaluasi dimulai oleh aktivitas pendataan dan inventarisasi aset pada satuan kerja kementerian/lembaga

2. Kondisi Infrastruktur Teknologi Informasi

Pada masa awal pelaksanaan revaluasi aset, infrastruktur teknologi informasi belum dapat digunakan secara maksimal karena kondisi jaringan internet yang tidak stabil dan aplikasi pendukung yang belum berjalan optimal. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui penambahan server, pengaturan lalu-lintas jaringan internet, penyempurnaan aplikasi

sehingga proses pertukaran data dapat berjalan dengan cepat.

3. Kendali Mutu Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dengan alokasi waktu yang singkat mengakibatkan terjadinya risiko kesalahan input tim penilai. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan ini adalah kendali mutu atas produk laporan penilaian kembali (LPK) BMN yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat KPKNL, Kanwil DJKN sampai Kantor Pusat DJKN.

4. Kondisi Objek

Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah karakteristik BMN yang menjadi objek penilaian kembali yaitu lokasi BMN tidak diketahui, BMN tersebar di berbagai pelosok wilayah, sulitnya akses menuju objek penilaian kembali (kondisi geografis maupun faktor keamanan), BMN berupa tanah tidak didukung dokumen legalitas yang cukup, dan objek diakui dan dikuasai sebagai milik pihak ketiga (masyarakat/penghuni/swasta/Pemda).

Untuk mengatasi hambatan ini, KPKNL menerapkan strategi penyelesaian dengan menggunakan pendekatan

wilayah untuk objek penilaian kembali yang lokasinya tersebar serta berkoordinasi secara intensif dengan instansi-instansi terkait.

5. *Force Majeure*

Faktor alam yang tidak dapat diprediksi juga menghambat pelaksanaan kegiatan revaluasi aset seperti gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pertengahan bulan Agustus 2018 mengakibatkan beberapa target BMN di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Agustus 2018. Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah akan membuat kebijakan khusus atas BMN yang terdampak bencana gempa bumi pada wilayah tersebut.

Pelaksanaan revaluasi aset selama tahun 2017 dan 2018 ini merupakan momentum bagi Pengelola Barang dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan BMN bersama-sama dengan seluruh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang. Revaluasi aset tidak hanya bertujuan untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan negara dan diungkapkannya dalam neraca pemerintah pusat, tetapi

semakin membantu manajemen guna pengambilan keputusan dalam manajemen aset negara (BMN). Baik keputusan dalam aspek penerimaan negara berupa pemanfaatan aset yang dapat menghasilkan PNBP berlandaskan nilai wajar aset dan analisa yang lebih tepat; dalam aspek belanja dimana terjadi efisiensi pengeluaran biaya operasional atas aset termasuk terjadinya *cost-saving* karena aset-aset yang idle dapat dialokasikan kepada K/L yang memerlukan; dan dari aspek pembiayaan *underlying asset* yang digunakan diungkapkan secara transparan sehingga investor sukuk mengetahui data mutakhir aset-aset tersebut.

Pemutakhiran data aset hasil revaluasi juga menjadi landasan bagi DJKN untuk di masa yang akan datang dalam rangka perencanaan penataan aset negara melalui *asset repurposing*, *rezoning*, dan *recycling* yang merupakan awal dari modernisasi pengelolaan aset negara sebagaimana praktik terbaik (*best practices*) di negara industri maju. Revaluasi aset berdampak terhadap APBN yang merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi aset negara (BMN) dalam pembangunan nasional.

Sejarah Singkat Hari Oeang

Setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Oeang. Pada tanggal tersebut di tahun 1946 untuk pertama kalinya Indonesia membuat mata uang sendiri sebagai alat pembayaran yang sah. Peristiwa ini menjadi cikal-bakal Hari Oeang yang dimeriahkan dengan berbagai acara oleh Kementerian Keuangan.

Mengapa kita harus punya mata uang sendiri?

Pertama, sebagai perwujudan negara yang merdeka, selain sistem pemerintahan yang mandiri, bangsa Indonesia perlu memiliki uang sendiri. Mata uang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

Kedua, sebagai bangsa yang baru merdeka, perlu alat pembayaran yang sah untuk menyatukan rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke. Mata uang merupakan salah satu hal untuk merekatkan NKRI.

Ketiga, mata uang merupakan wujud kedaulatan bangsa. Wakil Presiden Moh. Hatta pada pidatonya di Radio Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 1946 menyatakan bahwa dengan berlakunya ORI, telah tertutup suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Hari ini 72 tahun yang lalu menjadi salah satu penanda berakhirnya masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita, dan menuju bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Keempat, berdasarkan pertimbangan di atas, pada tanggal 30 Oktober 1946, untuk pertama kali diberlakukan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Kelima, ORI ditandatangani Menteri Keuangan A.A. Maramis. Mengapa yang tanda tangan Menteri Keuangan? Berdasarkan amanat Undang-undang (UU) tentang pengeluaran Uang Republik Indonesia, yakni UU 17/1946 dan UU 19/1946, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan



pengeluaran Uang Republik Indonesia.

Keenam, ORI pertama tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945.

Ketujuh, semenjak ORI berlaku, dinyatakan juga bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Sebelumnya, Indonesia memiliki empat mata uang. Pertama, uang kertas De Javasche Bank. Kedua, uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda De Javasche Regering dengan satuan gulden. Ketiga, uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan Bahasa Indonesia, yaitu Dai Nippon emisi 1943. Keempat, Dai Nippon Teikoku Seibu bergambar Wayang Orang Satria Gatot Kaca dan gambar Rumah Gadang Minang.

Dengan penerbitan ORI, Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka sepenuhnya karena pengaturan penerbitan uang yang berdampak pada perekonomian disusun sendiri oleh para pendiri bangsa.

Kemenkeu Berkerti Pada Negeri



Foto:
Media Keuangan/
Andi Al Hakim

PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Pajak Menembus Rp1.000 Triliun di Akhir Oktober, Pertumbuhan Mencapai 17,64% (19,30% di luar Tax Amnesty)



Realisasi penerimaan pajak untuk periode Januari - Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun, atau tumbuh 17,64 persen (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non-Migas yang mencapai 17,03 persen (yoy) serta PPN & PPnBM yang tumbuh 14,96 persen (yoy). Tanpa memperhitungkan penerimaan *Tax Amnesty* di triwulan I tahun 2017 (merupakan penerimaan yang bersifat *one-off*, sebesar Rp 12 triliun), pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan bulan Oktober 2018 mencapai 19,30 persen (yoy) atau yang tertinggi selama periode 2015 - 2018.

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi
Penerimaan
Pajak s/d
31 Oktober
2018

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 31 Oktober 2018		
		Rp	Δ% 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	593,21	17,96%	69,37%
- Migas	38,13	54,30	28,06%	142,40%
- Non Migas	817,00	538,91	17,03%	65,96%
PPN & PPnBM	541,80	405,44	14,96%	74,83%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	17,86	109,96%	66,01%
Jumlah	1.424,00	1.016,52	17,64%*	71,39%

*angka memperhitungkan pemindahbukuan penerimaan PBB tahun 2017

Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh kinerja positif beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang memberikan sinyal positif peningkatan aktivitas ekonomi.

Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tidak lepas dari pertumbuhan jenis-jenis pajak utama yang menunjukkan kinerja cukup menggembirakan. PPh Pasal 25/29 mampu melanjutkan *trend* pertumbuhan di atas 20 persen sepanjang tahun 2018, dimana PPh Pasal 25/29 Badan mampu tumbuh hingga 25,21 persen (yoy) sedangkan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tumbuh 21,00 persen (yoy). PPh Pasal 21 tumbuh 17,00 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,02

persen(yoy). Pertumbuhan signifikan dicatatkan oleh pajak-pajak atas impor, melanjutkan trend pertumbuhan tahun 2017. PPh Pasal 22 Impor tumbuh 27,72 persen (yoy) naik dari 15,61 persen, PPN Impor tumbuh 28,10 persen (yoy) naik dari 20,85 persen, serta PPnBM Impor tumbuh 6,11 persen (yoy) setelah di tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif (-15,36 persen). Secara umum, pajak atas impor tumbuh 27,56 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 18,59 persen (yoy).

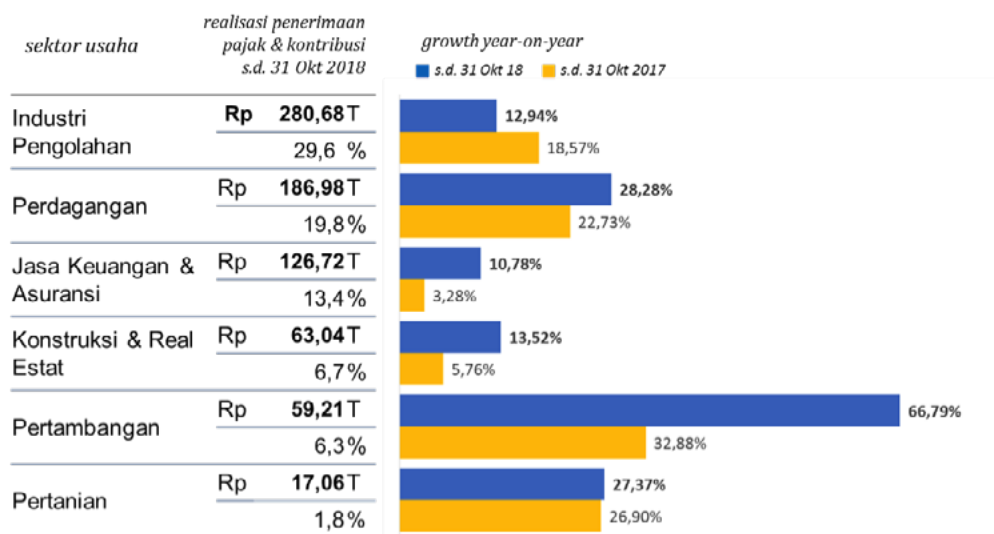
Jenis Pajak	<i>growth</i>	
	Januari - Oktober 2017	Januari - Oktober 2018
PPH Pasal 21	4,02%	17,00%
PPH Badan	18,75%	25,21%
PPN Orang pribadi	45,81%	21,00%
PPN Dalam Negeri	12,97%	8,94%
Pajak atas Impor	18,59%	27,56%
- PPh 22 Impor	15,61%	27,72%
- PPN Impor	20,85%	28,10%
- PPhBM Impor	-15,36%	6,11%

Pertumbuhan PPN Dalam Negeri mengalami perlambatan, yaitu hanya tumbuh 8,94 persen (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 12,97 persen (yoy). Terdapat beberapa penyebab dari perlambatan tersebut yaitu : (1) menguatnya PPN Impor mengakibatkan jumlah kredit pajak untuk PPN Dalam Negeri meningkat (PPN Impor merupakan kredit pajak PPN Dalam Negeri) sehingga pada akhirnya setoran PPN Dalam Negeri melambat; (2) meningkatnya restitusi pajak sebagai dampak jangka pendek dari program percepatan restitusi; dan (3) melambatnya penjualan eceran pada triwulan III 2018. Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia mengindikasikan penjualan eceran triwulan III 2018 diperkirakan tumbuh 4,6 persen (yoy), melambat

dibandingkan triwulan II 2018 sebesar 4,9 persen (yoy), meskipun lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,4 persen (yoy).

Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak cukup menggembirakan, terutama apabila kita lihat dalam konteks sumber pertumbuhannya. BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2018 sebesar 5,17 persen (yoy), yang merupakan sumber pertumbuhan alami penerimaan pajak. Dengan demikian, usaha (*effort*) dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta formulasi kebijakan dan program-program pendukungnya telah mampu menghasilkan kontribusi pertumbuhan hingga 12,46 persen.

Pertumbuhan
Penerimaan
Pajak



*Pertumbuhan di luar uang tebusan amnesti pajak, PPh migas, PPh DTP, PBB, PPh Final Revaluasi

Ditinjau dari sisi sektoral, penerimaan secara umum sektor-sektor utama penyumbang penerimaan mengalami pertumbuhan *double digits*, seperti Industri Pengolahan (tumbuh 12,94 persen yoy), Perdagangan (tumbuh 28,28 persen yoy) dan Jasa Keuangan (tumbuh 10,78 persen yoy). Hal

ini sejalan dengan Struktur PDB Indonesia menurut laporan triwulan III 2018 BPS, dimana "... sektor Industri Pengolahan, Pertanian-Kehutanan-Perikanan, Perdagangan, dan Konstruksi masih mendominasi pertumbuhan PDB Indonesia".

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Foto:
Direktorat Jenderal
Pajak

Tumbuh Bersama Generasi Emas Melalui Inklusi Kesadaran Pajak

Program Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program yang diusung Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan edukasi pajak kepada generasi muda Indonesia. Berdasarkan bonus demografi, bila kita melakukan penanaman kesadaran pajak di setiap muatan kurikulum pendidikan saat ini, maka di tahun 2045 akan terjadi peningkatan *awareness* pajak saat mereka merambah dunia usaha.

Untuk membangun masa depan perpajakan Indonesia perlu dipersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak yang lebih baik. Budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar terbentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara

melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam rangka mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak kepada generasi muda melalui pendidikan.

Program inklusi pajak ini telah berjalan sejak tahun 2014 sebagai bagian dari Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Terdapat tiga strategi utama pelaksanaan program ini, yakni: (1) menjalin kerjasama dengan instansi dan institusi yang terkait dengan dunia pendidikan; (2) penyediaan materi edukasi perpajakan; dan (3) pelaksanaan edukasi dan kampanye perpajakan.

Sebagai langkah awal, Kementerian

Keuangan telah menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan. Dalam perjalanannya, beberapa pihak menyambut baik gagasan ini, sehingga kerja sama inklusi kesadaran pajak saat ini telah terjalin dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. Untuk materi edukasi sendiri, kini telah tersedia bahan ajar SD, SMP dan SMA; Buku Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi; Buku Kesadaran Pajak untuk Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); dan Buku Pembelajaran Kesadaran Pajak untuk Dosen MKWU.

Inklusi melalui kurikulum disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, strategi inklusi berupa penyisipan materi kesadaran pajak dalam dengan penambahan/penekanan kesadaran pajak pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Di perguruan

tinggi, kurikulum bersifat otonom dan diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi, sehingga strategi inklusi dilakukan melalui kebijakan Kemenristek Dikti kepada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk meintegrasikan materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan di perguruan tinggi.

Selain menjadi bagian dari kurikulum, diupayakan juga untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak melalui berbagai kegiatan di luar sekolah. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kesiswaan yang dapat diberikan muatan kesadaran pajak, seperti kegiatan ekstrakurikuler Duta Pajak, *company visit*, *Tax Goes To School*, Pekan Kreativitas Siswa, Olimpiade Perpajakan, Lomba Menulis, dan kegiatan kepramukaan. Direktorat Jenderal Pajak juga aktif melaksanakan kampanye seperti *sharing session* Perguruan Tinggi, Bimbingan Fasilitator Inklusi, Bimbingan Teknis Dosen Mitra, serta kegiatan Pajak Bertutur.

Di tahun 2018 ini kegiatan kampanye digandakan melalui Pekan Inklusi,

yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi kesadaran pajak kepada dunia pendidikan yang dilaksanakan selama sepekan, untuk jenjang sekolah tingkat dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Pajak mulai tanggal 5 - 9 November 2018. Puncak pekan inklusi adalah acara Pajak Bertutur, yaitu kegiatan mengajar kesadaran pajak kepada siswa/i dan mahasiswa/i yang dilakukan oleh pegawai di setiap unit kerja DJP pada saat yang bersamaan serentak di seluruh Indonesia. Khusus acara Pajak Bertutur yang dilakukan di Kantor Pusat DJP dihadiri oleh Menteri Keuangan.

Acara Pajak Bertutur ini didahului oleh penandatanganan kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Setelah bekerja bersama dan melakukan MoU dengan Kemenristekditi bersama Kemendikbud, maka giliran Kemenag dan Kemendagri bergandengan tangan untuk memberikan muatan

pembelajaran kesadaran pajak di sekolah-sekolah keagamaan di bawah Kemenag dan sekolah serta lembaga pendidikan di bawah Pemerintah Daerah. Keterkaitan LIPI juga untuk meningkatkan awareness atas riset perpajakan yang hasilnya dapat mendukung DJP mencapai tujuan edukasi yaitu meningkatkan awareness, pengetahuan dan merubah perilaku. Selain itu juga ada Perjanjian Kerja Sama dengan UT, jajaran Kemenristekdikti dan Kemendagri. "Hasil dari kegiatan ini," tutur ibu Sri, "hasilnya baru dapat dinikmati setelah lintas generasi."



Foto:
Direktorat Jendral
Pajak

Tingkatkan Pelayanan, Pajak Kini Hadir Lebih Dekat

Membayar pajak merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai otoritas perpajakan yang mengemban amanat Undang-Undang untuk mengadministrasikan penerimaan pajak Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Seiring dengan terus bertumbuhnya jumlah Wajib Pajak dan sebarannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses kepada Wajib Pajak, di tahun 2018 ini Direktorat Jenderal Pajak membuka unit kerja baru, yaitu :

- (1) pembentukan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sebagai hasil pemekaran Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau,
- (2) pembentukan KPP Madya Bogor,
- (3) pembentukan 10 KPP Pratama baru sebagai hasil pemekaran 10 KPP yang lama.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam acara peresmian Saat Mulai Operasi (SMO) unit-unit

baru tersebut di Kanwil DJP Kepulauan Riau mengatakan, "Para Wajib Pajak kini dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan karena hadirnya unit-unit baru yang lebih dekat dengan mereka. Oleh karena itu, saya juga berharap seluruh pegawai DJP terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan," Dalam sambutan tersebut juga disampaikannya, "Unit-unit DJP baik yang baru maupun yang sudah terbentuk sebelumnya harus mampu meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan institusi lainnya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan,"

Pembentukan unit-unit baru untuk meningkatkan pelayanan ini sejalan dengan upaya DJP untuk hadir lebih dekat dengan Wajib Pajak. Program-program lain yang juga telah dilaksanakan untuk memperluas jangkauan layanan kepada Wajib Pajak di antaranya *Mobile Tax Unit* dan *Pojok Pajak*.

Daftar kantor
vertikal baru di
DJP

KANTOR LAMA	KANTOR BARU
-	KPP Madya Bogor
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	Kanwil DJP Riau
	Kanwil DJP Kepulauan Riau
KPP Pratama Samarinda	KPP Pratama Samarinda Ilir
	KPP Pratama Samarinda Ulu
KPP Pratama Banjarmasin	KPP Pratama Banjarmasin Utara
	KPP Pratama Banjarmasin Selatan
KPP Pratama Pontianak	KPP Pratama Pontianak Barat
	KPP Pratama Pontianak Timur
KPP Pratama Jambi	KPP Pratama Jambi Telanaipura
	KPP Pratama Jambi Pelayangan
KPP Pratama Banda Aceh	KPP Pratama Banda Aceh
	KPP Pratama Aceh Besar
KPP Pratama Serang	KPP Pratama Serang Barat
	KPP Pratama Serang Timur
KPP Pratama Balikpapan	KPP Pratama Balikpapan Timur
	KPP Pratama Balikpapan Barat
KPP Pratama Cirebon	KPP Pratama Cirebon Satu
	KPP Pratama Cirebon Dua
KPP Pratama Mojokerto	KPP Pratama Mojokerto
	KPP Pratama Jombang
KPP Pratama Jkt Pasar Minggu	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

KEPABEANAN DAN CUKAI

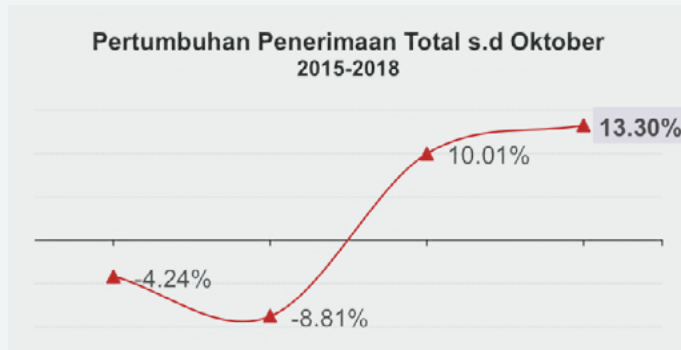
Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai di semua komponen.

Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai hingga bulan Oktober 2018 adalah Rp144,14 triliun, atau 74,26 persen dari target APBN 2018. Capaian tersebut lebih tinggi dari persentase capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar 67,26 persen, sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 13,30 persen (yoy)

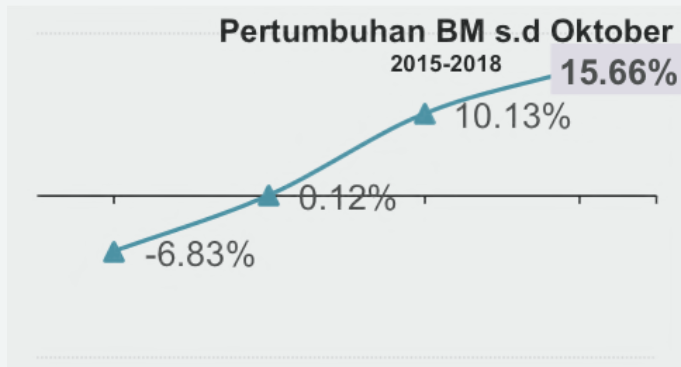
atau Rp16,93 triliun. Pertumbuhan penerimaan tersebut masih meneruskan tren pertumbuhan positif sejak awal tahun 2018, yang tumbuh sebesar 2 digit atau tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal serupa terjadi pada ketiga komponen penerimaan, yaitu bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan cukai, yang juga tumbuh lebih tinggi sejak tahun 2015.

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi 2018	% Capaian	Realisasi 2017	Pertumbuhan (yoy)		
						Nominal	%2018	%2017
1	Bea Masuk	35.70	32.22	90.26	27.86	4.36	15.66	10.13
2	Cukai	155.40	106.21	68.35	96.24	9.97	10.36	9.47
3	Bea Keluar	3.00	5.70	190.13	3.11	2.59	83.20	28.13
	Total	194.10	144.14	74.26	127.21	16.93	13.30	10.01
	PPN Impor		151.95		118.62	33.33	28.10	20.85
	PPn BM Impor		3.45		3.26	0.20	6.11	-15.36
	PPh Pasal 22 Impor		45.46		35.59	9.87	27.72	15.61
	Total PDRI lainnya		200.86		157.47	43.39	27.56	18.59
	Total DJBC dan Perpajakan		345.00		284.68	60.32	21.19	14.59

Pertumbuhan
Penerimaan
Total s.d.
Oktober 2015-
2018



Pertumbuhan
Penerimaan Bea
Masuk
s.d Oktober,
2015-2018

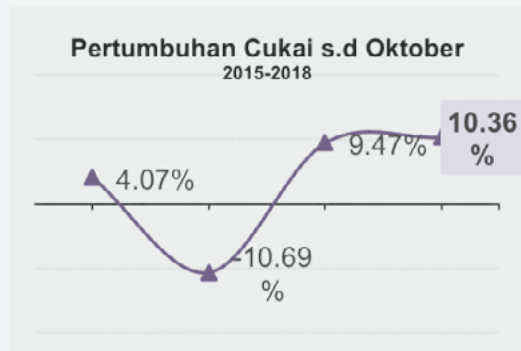


Realisasi penerimaan BM sampai dengan bulan Oktober 2018 masih menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut nampak dari pertumbuhan penerimaan BM yang mencapai 15,66 persen, dan masih yang tertinggi dibandingkan 3 tahun terakhir. Capaian penerimaan BM tersebut berasal dari capaian penerimaan rutin dan *extra effort* yang masing-masing tumbuh 16,75 persen dan 3,66 persen. Penerimaan rutin didorong oleh pertumbuhan devisa impor yang positif, meskipun dibayangi peningkatan utilisasi *free trade*

agreement (FTA) sebesar 2,3 persen. Sedangkan dampak positif program penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) berkontribusi pada penerimaan *extra effort*.

Pertumbuhan importasi yang berkontribusi signifikan pada penerimaan BM, didominasi oleh impor pada sektor industri pengolahan dan impor bahan baku / penolong. Masih tumbuhnya impor sektor industri menjadi sinyal positif bahwa industri dalam negeri masih menggeliat.

Pertumbuhan
Penerimaan
Cukai s.d.
Oktober, 2015-
2018



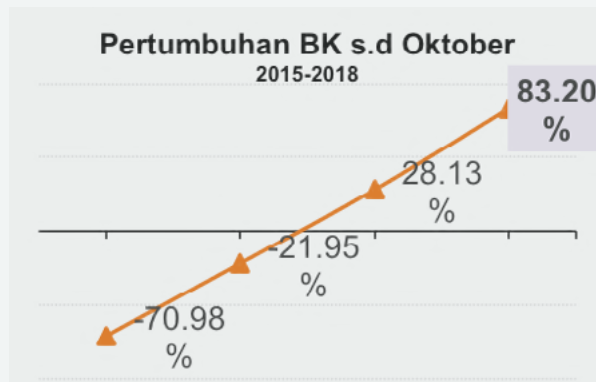
Penerimaan cukai hingga bulan Oktober 2018 masih menunjukkan performa yang positif, dengan capaian penerimaan yang terbesar diantara komponen penerimaan lainnya. Capaian penerimaan cukai disumbangkan paling tinggi oleh cukai hasil tembakau (CHT), berturut-turut kemudian minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA).

Sebagai kontributor penerimaan cukai terbesar, CHT yang tumbuh 9,88 persen didorong oleh kenaikan tarif efektif yang melebihi kenaikan tarif normatif sebesar 10,04 persen. Sementara itu, produksi hasil tembakau (HT) yang masih

tumbuh sebesar 2,56 persen turut mendorong performa capaian CHT. Kenaikan produksi HT ditengarai sebagai dampak positif dari program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang mampu mengurangi peredaran HT ilegal.

Realisasi penerimaan cukai MMEA tumbuh 15,80 persen, capaian ini disebabkan oleh kinerja produksi MMEA yang meningkat. Pertumbuhan produksi tersebut terjadi baik pada MMEA produksi dalam negeri maupun impor. Tumbuhnya produksi MMEA juga merupakan efek positif dari program PCBT yang berhasil mengurangi peredaran MMEA ilegal.

Pertumbuhan
Penerimaan BK
Juni 2015 -
2018



Penerimaan BK hingga bulan Oktober 2018 sudah melebihi target APBN 2018 dengan capaian 190,13 persen. Performa pertumbuhan penerimaan BK sebesar 83,20 persen, merupakan yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan komponen penerimaan lainnya sekaligus sebagai

pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Capaian tersebut ditopang oleh ekspor komoditas mineral tambang yang tumbuh hingga 121,22 persen, namun demikian komoditas biji kakao yang mencatatkan kinerja pertumbuhan tertinggi penerimaan BK.

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Capaian PNBP hingga September 2018 Telah Mencapai 102,16 persen dari Target Didorong oleh Kenaikan Harga ICP dan HBA.

Realisasi
PNBP s.d. 31
Oktober 2018
(dalam miliar
Rupiah)

	2018 APBN	Realisasi s.d 31 Okt 2018	% thd APBN	Growth
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,43	315,44	114,53	34,52
A. Penerimaan SDA	103,67	142,03	137,00	72,62
1 Migas	80,35	112,19	139,62	91,36
a Minyak Bumi	59,58	112,19	188,28	91,36
b Gas Alam	20,77	-	-	-
2 Non Migas	23,33	29,84	127,95	26,18
a Pertambangan Minerba	17,86	24,52	137,30	25,98
b Kehutanan	4,17	3,85	92,33	18,78
c Perikanan	0,60	0,33	55,32	(20,55)
d Pend. Per. Panas Bumi	0,70	1,14	163,41	114,79
B Pendapatan dari KND	44,70	42,47	95,01	3,14
C. PNBP Lainnya	83,75	88,31	105,45	17,16
D. Pendapatan BLU	43,30	42,63	98,44	19,53

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, realisasi PNBP mencapai Rp315,44 triliun atau 114,53 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 34,52 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara pada tahun 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas

mencapai Rp112,18 triliun atau 139,62 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 91,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan karena lebih tingginya realisasi ICP periode bulan Desember 2017 - Oktober 2018, yaitu sebesar USD68,44 per barel atau periode bulan Januari - Oktober 2018 sebesar USD69,18 per barel, dibandingkan realisasi ICP bulan Desember 2016 -

Oktober 2017, yaitu sebesar USD49,54 per barel atau periode bulan Januari s.d. Oktober 2017 sebesar USD 49,38 per barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp29,84 triliun atau 127,95 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 26,18 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp23,65 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batu bara acuan (HBA) pada periode Januari - Oktober 2018 yang mencapai USD99,71 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari - September 2017 sebesar USD 84,22 per ton.

Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp42,47 triliun atau 95,01 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 3,14 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp41,17 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan perbaikan kinerja BUMN.

Realisasi penerimaan PNBPN Lainnya

mencapai Rp88,31 triliun atau 105,45 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 17,16 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp75,38 triliun. Peningkatan realisasi penerimaan PNBPN Lainnya ini antara lain disebabkan kenaikan realisasi Penjualan Hasil Tambang yang mencapai Rp15,83 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp13,82 triliun, sejalan dengan peningkatan HBA dan kenaikan Pendapatan Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio yang mencapai Rp13,75 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp4,11 triliun, yang disebabkan perubahan kebijakan (*re-profiling*) waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan pita frekuensi dari bulan Desember menjadi bulan September.

Untuk pendapatan BLU, hingga 31 Oktober 2018 terealisasi sebesar Rp42,63 triliun, atau mencapai 98,44 persen dari target APBN tahun 2018, meningkat 19,53 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp35,66 triliun.



Foto:
Media Keuangan/
Anas Nur Huda

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Percepatan penyaluran belanja Bantuan Sosial pasca bencana alam di Lombok (NTB) dan Palu-Donggala (Sulawesi Tengah) turut meningkatkan penyerapan Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Optimalisasi BPP senantiasa terus dilakukan baik dalam mendukung program pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan belanja guna mendorong tercapainya

tujuan pembangunan, antara lain terwujudnya peningkatan kualitas SDM, perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat, perluasan perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2018			
	APBN	Realisasi s.d. Okt	% thd APBN	% Growth
Belanja K/L	847,44	586,37	69,19	14,69
Belanja Pegawai	227,46	181,72	79,89	9,13
Belanja Barang	338,83	228,17	67,34	18,87
Belanja Modal	203,88	107,34	52,65	1,23
Bantuan Sosial	77,26	69,14	89,49	47,77
Belanja Non K/L	607,06	488,06	80,40	26,04
Pembayaran Bunga Utang	238,61	213,22	89,36	16,45
Subsidi	156,23	160,36	102,64	56,20
Jumlah	1.454,49	1.074,43	73,87	19,58

Realisasi anggaran BPP pada bulan Oktober 2018 telah mencapai Rp135,64 triliun atau sekitar 9,33 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Sedangkan realisasi anggaran BPP sampai dengan 31 Oktober 2018 telah mencapai Rp1.074,43 triliun atau 73,87 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi anggaran BPP tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar 65,73 persen (yoy). Anggaran BPP terdiri atas (1) belanja K/L realisasinya sebesar Rp586,37 triliun atau 69,19 persen dari pagu APBN tahun 2018; dan (2) belanja Non-K/L realisasinya sebesar Rp488,06 triliun atau 80,40 persen dari pagu APBN tahun 2018. Kinerja realisasi anggaran BPP tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan kinerja realisasi pada tahun 2017.

Peningkatan penyerapan anggaran BPP sampai dengan Oktober 2018 tersebut lebih dipengaruhi antara lain: 1) realisasi penyerapan belanja barang mencapai Rp327,97 triliun atau mencapai 67,11 persen dari pagu APBN tahun 2018 yang lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 64,90 persen 2) realisasi penyerapan belanja modal mencapai Rp107,34 triliun atau 52,65 persen dari pagu APBN tahun 2018 yang lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 47,20 persen, dan 3) belanja bantuan sosial mencapai Rp69,14 triliun atau 89,49 persen yang lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 85,73 persen.

Kinerja belanja modal sampai dengan Oktober 2018 lebih baik bila dibandingkan tahun 2017. Hal ini

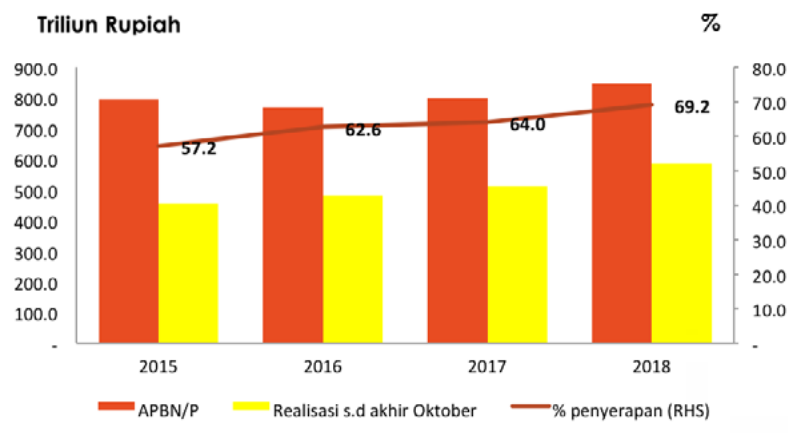
dapat dilihat dari realisasi belanja modal sampai dengan Oktober 2018 mencapai 52,65 persen dari pagu APBN tahun 2018, lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya mencapai 47,20 persen terhadap APBN 2017. Peningkatan kinerja belanja modal terutama disebabkan pada tahun 2018 tidak ada APBNP sehingga K/L fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya perubahan terhadap APBN di tahun 2018 menyebabkan peningkatan kinerja penyerapan BPP.

Dalam rangka mendukung penguatan anggaran BPP yang lebih produktif, Pemerintah telah menerapkan kebijakan *capping* terhadap belanja barang dengan tetap berusaha menjaga *output* sesuai target dan kualitas layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, Pemerintah mengedepankan konsep *value for money* (VFM) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam membelanjakan anggarannya. Diharapkan dalam setiap rupiah anggaran belanja yang dikeluarkan Pemerintah, diupayakan dapat menghasilkan *output* yang lebih berkualitas, dan yang lebih penting adalah masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengeluaran anggaran tersebut. Dengan pelaksanaan kebijakan *capping* belanja barang, diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat secara lebih optimal menstimulasi perekonomian meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal Pemerintah.

REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2018

Realisasi anggaran Belanja K/L sampai dengan 31 Oktober 2018 mencapai Rp586,37 triliun atau 69,19 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L, antara lain: (1) kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, (2) percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, bidik misi, dan Penerima Bantuan Iuran/PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN), (3) pembayaran THR bagi PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan di tahun 2018, serta (4) pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti Pilkada Serentak, pelaksanaan *Asian Games* di Jakarta dan Palembang tahun 2018, dan *Asian Para Games* di Jakarta tahun 2018, serta pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali tahun 2018.

Di sisi lain, telah dialokasikan anggaran penanggulangan bencana alam dalam rangka memberikan bantuan stimulan rumah sejumlah 68.753 unit rumah di Lombok, terdiri atas 36.929 unit rumah rusak berat, 8.286 unit rumah rusak sedang, dan 23.538 unit rumah rusak ringan. Bantuan stimulan rumah tersebut diberikan secara bertahap sesuai ketersediaan dokumen pendukung hasil verifikasi dan validasi data di lapangan, dan sampai saat ini sebanyak 68.753 unit rumah yang telah mendapat bantuan stimulan melalui Dana Siap Pakai (*On Call*) dari Bagian Anggaran BUN yang direalokasikan ke belanja K/L. Selain itu, untuk menangani bencana di Lombok, Pemerintah melalui K/L telah merealisasikan bantuan logistik, santunan ahli waris, paket sembako, dapur umum, logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi bantuan, guru, pembelajaran, serta menyediakan sarana umum sementara. Sedangkan untuk bencana



Penyerapan belanja K/L sampai dengan akhir Oktober periode tahun 2015 - 2018

alam di Palu-Donggala (Sulawesi Tengah) masih dalam proses verifikasi dan identifikasi.

Realisasi penyerapan anggaran belanja K/L terhadap 15 K/L dengan pagu terbesar sampai dengan 31 Oktober 2018 mencapai Rp494,89 triliun atau mencapai 70,18 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 maupun tahun 2016. Dari 15 K/L dengan pagu terbesar tersebut terdapat sepuluh K/L yang memiliki kinerja penyerapan belanja di atas rata-rata nasional sebesar 69,19 persen, yaitu: (1) Kementerian Hukum

dan HAM, (2) Mahkamah Agung, (3) Kementerian Sosial, (4) Kementerian Kesehatan, (5) Kementerian Luar Negeri, (6) Kepolisian RI, (7) Kementerian Ristek dan Dikti, (8) Kementerian Agama, (9) Kementerian Keuangan, dan (10) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan belanja K/L terutama percepatan penyaluran beberapa komponen program perlindungan sosial, seperti penarikan dimuka penerima bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Meskipun analisis kinerja menunjukkan

Penyerapan
belanja 15 K/L
dengan pagu
terbesar
sampai dengan
31 Oktober
periode tahun
2017 - 2018

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 31 Okt	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Okt	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,82	76,09	66,27	107,68	72,81	67,62
2	KEMEN PU PERA	104,24	63,81	61,22	107,39	67,27	62,64
3	POLRI	98,22	60,20	61,29	95,03	70,90	74,60
4	KEMENAG	63,49	42,70	67,26	62,15	44,40	71,43
5	KEMENKES	55,86	40,89	73,20	59,10	47,06	79,64
6	KEMENHUB	44,64	25,66	57,48	48,20	28,23	58,56
7	KEMENKEU	40,54	29,63	73,10	45,68	32,33	70,77
8	KEMENDIKBUD	37,97	15,33	88,49	41,30	34,31	83,09
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	26,10	66,09	41,28	29,88	72,37
10	KEMENTAN	24,15	28,71	75,61	40,09	27,99	69,82
11	KEMENSOS	17,32	15,01	62,15	23,82	13,88	58,28
12	KEMENKUMHAM	11,21	7,00	62,46	10,59	9,39	88,63
13	KKP	9,14	6,49	79,27	8,26	6,89	83,36
14	MA	8,18	3,22	35,23	7,29	4,14	56,86
15	KEMENLU	7,17	4,72	65,90	7,25	5,41	74,62
15 K/L dengan Pagu Terbesar		676,43	445,56	65,87	705,12	494,89	70,18
K/L Lainnya		122,16	65,42	53,55	142,31	91,48	64,28
JUMLAH		798,59	510,98	63,99	847,44	586,37	69,19

optimisme dalam capaian target *output* maupun target penyerapan anggaran, dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat potensi kendala yang perlu diantisipasi, misalnya pada kementerian yang pekerjaannya berupa pembangunan fisik, antara lain: (1) penyediaan maupun pembebasan lahan terkait dengan permintaan ganti rugi lahan; (2) perpindahan lokasi proyek yang perlu kajian ulang; (3) dokumen teknis yang masih dalam proses reviu teknis; (4) masih perlu reviu Uang Muka Proyek terhadap kegiatan yang akan dilelangkan; (5) keterlambatan dalam

proses pengadaan dan memulai pekerjaan serta ada beberapa paket masih dalam proses lelang; dan (6) dokumen kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) yang belum lengkap.

Selain capaian penyerapan anggaran, kinerja K/L juga dapat dilihat dari capaian *output* K/L, misalnya *output* di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Berikut ini menunjukkan capaian *output* strategis beberapa K/L di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sampai dengan Oktober 2018, sebagai berikut

Kementerian/Lembaga	Target		Realisasi	
	Anggaran (juta rupiah)	Output	Anggaran (juta rupiah)	Output
KEMENDIKBUD				
Penyaluran KIP (siswa)	9.646.127,0	17,9 juta	8.269.000	14,9 juta
Rehab/bangun ruang kelas	1.269.051,0	24,7 ribu	1.362.557	22,6 ribu
KEMENAG				
Penyaluran KIP (siswa)	1.181.191,0	1,7 juta	678.289	899.600
Penyaluran BOS (siswa)	46.695.530,0	8,7 juta	7.911.202	8.107.036
Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	319.999,5	32 ribu	235.091	17.810
KEMENRISTEKDIKTI				
Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	3.764.798,3	368.961	3.356.980	315.833
KEMENKES				
Penyaluran JKN-KIS (jiwa)	25.502.400,0	92,4 juta	25.474.952	92,3 juta
KEMENSOS				
Penyaluran PKH (KPM)	19.251.754,9	10,0 juta	17.275.226	9,9 juta
Bantuan Pangan	20.831.137,9	15,6 juta	16.821.732	15,2 juta

Output strategis belanja pemerintah pusat bidang pendidikan dan kesejahteraan sampai dengan 31 Oktober 2018

Tabel di atas adalah capaian output strategis K/L yang tugasnya hampir seluruhnya pembangunan fisik. Realisasi pembangunan jalan baru mencapai 66,24 persen dari target fisik, pembangunan jalan tol sudah mencapai 73,41 persen dari target fisik, pembangunan jembatan sudah

mencapai 65,90 persen dari target fisik, dan pembangunan *fly over* dan *underpass* sudah mencapai 64,75 persen dari target fisik. Hal yang paling menggembirakan adalah pembangunan empat bandara baru yang ditargetkan pada tahun 2018 sudah mencapai 100 persen dan telah

Progress kegiatan prioritas/
utama tahun 2018
Sampai dengan 31 Oktober
2018

No.	UNIT ORGANISASI / KEGIATAN PRIORITAS	TARGET TAHUN 2018	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	PROGRES KEUANGAN	PROGRES FISIK
A DITJEN SUMBER DAYA AIR					
1	Bendungan	48 Bendungan	7.525,74	64,60	65,77
	a. Bendungan Baru	14 Bendungan	113,91	42,13	1,38
	b. Bendungan On Going	34 Bendungan	7.411,83	64,20	66,71
2	Embung	43 Buah	636,91	61,44	76,87
3	Air Baku	5,92m ³ /dt	3.569,45	65,29	73,39
4	Jaringan Irigasi	145.533 Ha	4.629,68	52,10	59,17
5	Sapras Pengendali Daya Rusak Air	221 Km	3.332,20	73,72	76,38
6	Pengendali Sedimen dan Lahar	31 Buah	233,86	86,97	85,76
B DITJEN BINA MARGA					
1	Pembangunan Jalan	811,49 km	6.542,76	42,30	66,24
2	Pembangunan Jembatan	9,708,91 km	3.626,59	37,05	65,90
3	Pembangunan Jalan Tol	33,05 km	1.946,06	78,92	73,41
4	Pembangunan Fly Over / Underpass	2,420,40 km	658,37	63,60	64,75
C DITJEN CIPTA KARYA					
1	Pembangunan SPAM	3.437 ltr/dt	3.252,00	87,96	65,72
2	Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.991 Ha	1.637,75	64,63	75,01
3	Sanitasi dan Persampahan	2.095.063 KK	2.807,02	55,92	65,52
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	401.622 m ²	3.217,29	80,30	66,51
D DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN					
1	Pembangunan Rumah Susun	13.500 Unit	4.955,02	44,08	52,25
2	Pembangunan Rumah Khusus	5.000 Unit	730,03	47,41	59,16
3	Pembangunan Rumah Swadaya	250.000 Unit	3.259,16	90,18	74,35
II KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
1 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA					
1	Pembangunan Bandara	4 Bandara	4.955,02	44,08	52,25
2 DITJEN PERKERETAAPIAN					
1	Pembangunan Rel KA (Baru)	248,5 km'sp	16.543,63	72,05	36,62
2	Pembangunan Rek KA (Lanjutan)	366 km'sp			82,05

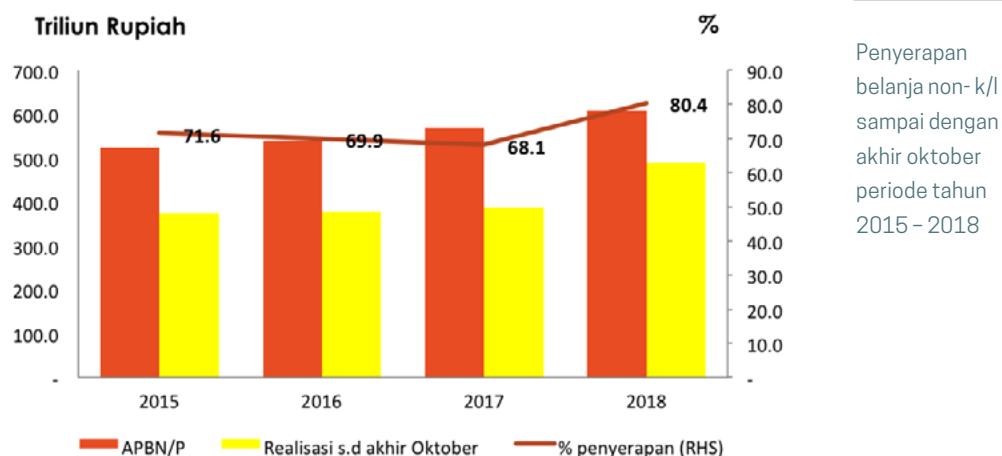
beroperasi, meskipun masih terdapat pekerjaan lanjutan. Selain itu, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2.416,17 miliar dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol. Untuk pekerjaan *Multi Years Contract* (MYC), realisasi keuangan hanya untuk tahun 2018 karena sebagian besar adalah uang muka proyek.

REALISASI BELANJA NON K/L TAHUN 2018

Kinerja realisasi pada belanja non-K/L sampai dengan 31 Oktober 2018 mencapai Rp488,06 triliun atau mencapai 80,40 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Realisasi belanja non-K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja Non-K/L antara lain: (1) realisasi Belanja Pegawai lebih tinggi karena pembayaran THR

bagi pensiunan, (2) realisasi subsidi lebih tinggi karena penyelesaian pembayaran kurang bayar subsidi energi tahun sebelumnya dan penyesuaian kebijakan subsidi tetap Solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter, serta (3) pembayaran bunga utang lebih tinggi yang disebabkan antara lain karena kenaikan imbal hasil SBN dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Meskipun demikian, perkembangan belanja subsidi selama periode 2014 – 2018 menunjukkan tren penurunan terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi energi, misalnya perbaikan skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran (penerima manfaat subsidi) dan pemberian subsidi terbatas untuk minyak solar.

Selain itu, realisasi belanja Non-K/L juga dipengaruhi oleh pencairan dana cadangan program JKN, serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok (NTB) dan Palu-Donggala (Sulteng). Pada tahun 2018 terdapat isu-isu aktual terkait belanja yang diperkirakan terjadi sampai dengan akhir tahun 2018, yaitu terkait dengan pelaksanaan Program JKN yang meliputi penyediaan dana cadangan program JKN sebesar Rp4,9 triliun dan sudah dicairkan, serta terdapat potensi defisit pada Dana Jaminan Sosial Kesehatan sampai akhir tahun 2018 yang diperkirakan mencapai Rp9,0 triliun.



TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun, telah terealisasi sebesar Rp646,42 triliun (84,37 persen dari pagu alokasi TKDD) sampai dengan 31 Oktober 2018. Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp7,58 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp638,84 triliun (83,36 persen dari pagu alokasi). Secara umum, capaian tersebut dipengaruhi oleh realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2017.

A. DANA PERIMBANGAN

Komponen terbesar dari TKDD adalah Dana Perimbangan, yang pada APBN Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun atau 88,31 persen dari keseluruhan alokasi TKDD. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp490,71 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp578,79 triliun atau 85,54 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar Rp9,89 triliun dibandingkan dengan realisasi

pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp568,91 triliun, atau 83,84 persen dari pagu APBNP 2017.

1. DANA TRANSFER UMUM (DTU)

DTU terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dinamakan sebagai transfer umum karena sifatnya yang relatif bebas digunakan oleh daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. DTU mempunyai peranan yang sangat penting bagi APBD karena merupakan penopang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum daerah. Sampai dengan 31 Oktober 2018, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) mencapai Rp436,75 triliun, atau 89,00 persen dari pagu anggaran DTU yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Capaian tahun ini meningkat Rp0,69 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp436,05 triliun atau 88,28 persen dari pagu alokasi.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Kinerja realisasi penyaluran DAU relatif sama dari tahun ke tahun, karena disalurkan secara rutin sebesar 1/12 setiap bulannya. Sampai dengan 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp367,62

triliun, lebih tinggi sebesar Rp2,51 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp365,11 triliun. Realisasi penyaluran DAU hingga 31 Oktober 2018 dipengaruhi oleh adanya penundaan penyaluran DAU, yakni: (i) sebesar Rp234,57 miliar terhadap 39 daerah yang belum menyampaikan laporan informasi keuangan daerah (IKD), (ii) sebesar Rp1,64 miliar terhadap 1 daerah yang belum menyampaikan laporan belanja infrastruktur, (iii) sebesar Rp 91,93 miliar terhadap 13 daerah yang belum menyampaikan komitmen pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), dan (iv) sebesar Rp 81,75 miliar terhadap 6 daerah yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD TA 2017.

Selain itu, realisasi penyaluran DAU tersebut juga telah memperhitungkan : (i) penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelengaran Jaminan Sosial (BPJS) oleh 14 daerah sebesar Rp17,70 miliar, (ii) penyaluran kembali DAU sebesar Rp165,30 miliar kepada 30 daerah yang telah menyampaikan laporan IKD, dan (iii) penyaluran kembali DAU sebesar Rp 59,52 miliar kepada 2 daerah atas penyampaian komitmen Alokasi Dana Desa (ADD)..

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berbeda dengan kinerja realisasi penyaluran DAU yang relatif stabil, kinerja realisasi penyaluran DBH seringkali berfluktuasi antar-tahun. Hal ini terutama disebabkan adanya mekanisme penyelesaian Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH. Pada APBN tahun 2018, pagu anggaran DBH ditetapkan sebesar Rp89,22 triliun, atau Rp6,15 triliun lebih rendah bila dibandingkan pagu alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp95,38 triliun. Hingga 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran DBH mencapai Rp69,13 triliun, atau 77,48 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Capaian ini secara persentase meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya sebesar 74,38 persen dari pagu alokasi APBNP 2017. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

- Adanya penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10,85 triliun yang disalurkan pada bulan Februari 2017, sehingga realisasi penyaluran DBH tahun 2017 relatif lebih besar; dan
- Perubahan pola Penyaluran DBH triwulan I dan triwulan II 2018, yang semula sebesar 25 persen dari pagu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017, diubah menjadi sebesar 20 persen dari pagu, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

- Penurunan besaran penyaluran pada triwulan I dan triwulan II tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- Terdapat penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan triwulan III 2018 untuk 249 daerah sebesar Rp304,7 miliar, karena belum memenuhi persyaratan penyaluran DBH triwulan III berupa laporan penggunaan DBH Dana Reboisasi (DR) semester I, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan DR.
- Adanya penyaluran TW IV yang dilakukan pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp11,46 triliun Penyaluran sudah mempertimbangkan perubahan alokasi DBH berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara tahun 2018. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2017 tidak dilakukan penyaluran DBH TW IV.

Ketentuan penyampaian laporan penggunaan DBH DR dimaksud pada tahun 2017 belum menjadi persyaratan penyaluran DBH Kehutanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 disebutkan bahwa Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) digunakan untuk mendanai program sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I 2018, program pembinaan lingkungan sosial menempati alokasi terbesar yaitu sebesar 85,47 persen yang bertujuan untuk mengatasi dampak kesehatan/ sosial akibat konsumsi rokok. Dalam program ini, kegiatan di bidang kesehatan menempati urutan pertama anggaran terbesar yaitu sebesar 62,01 persen dari pagu anggaran pembinaan lingkungan sosial. Di bidang kesehatan ini, penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana Fasilitas Kesehatan merupakan pendanaan yang paling dominan yaitu sebesar 72,52 persen dari pagu anggaran bidang kesehatan, sementara anggaran untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan (bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja) sebesar Rp308,33 miliar atau setara dengan 22,53 persen dari pagu anggaran bidang kesehatan.

2. DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)

DTK mempunyai peran yang sangat strategis karena dalam komponen transfer khusus inilah Pemerintah Pusat akan mempunyai peranan untuk

mempengaruhi pola belanja daerah dalam upaya mengurangi kesenjangan layanan antar-daerah. Hal ini dilakukan melalui *earmarking* (pengarahan/ penentuan) penggunaan dari DTK. Dalam APBN 2018, DTK dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp142,04 triliun, atau 76,41 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp9,19 triliun bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp132,85 triliun, atau 71,96 persen dari pagu APBNP 2017.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap, dengan besarnya penyaluran 25 persen tahap I, 45 persen tahap II, dan tahap III sebesar selisih antara kebutuhan pendanaan kegiatan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan. Hal tersebut berbeda dengan tahun 2017, dimana tahun sebelumnya, DAK Fisik disalurkan dalam empat periode triwulanan. Hingga periode 31 Oktober 2018, penyaluran DAK Fisik mencapai Rp45,20 triliun atau 72,39 persen dari pagu alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp62,44 triliun. Jika dibanding periode yang sama pada tahun 2017, realisasi DAK Fisik tersebut lebih tinggi Rp1,19 triliun. Realisasi DAK Fisik tahun 2018 tersebut terdiri dari : (i) DAK Reguler sebesar Rp23,01 triliun, (ii) DAK Penugasan sebesar Rp17,57 triliun, dan (iii) DAK Afirmasi sebesar Rp4,61 triliun.

Outlook penyaluran DAK fisik dapat diperkirakan dari besaran kontrak yg telah disampaikan oleh pemerintah daerah hingga tanggal 23 Juli 2018, dimana besaran kontrak tersebut mencapai 93,5 persen dari pagu total sebesar Rp62,44 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat 41 daerah untuk 13 bidang secara total tidak dapat direalisasikan karena adanya kendala pelaksanaan kegiatan di daerah. Oleh karena mekanisme penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan, maka bagi daerah dan bidang yang tidak dapat merealisasikan kontrak yang telah direncanakan, DAK fisik tahap II dan III untuk daerah dan bidang tersebut tidak dapat disalurkan. Mengacu pada data tersebut, outlook penyaluran DAK Fisik tahun 2018 diperkirakan sebesar 93,2 persen dari pagu nasional. Angka tersebut masih lebih besar dibanding dengan realisasi penyaluran DAK Fisik tahun 2017 yang sebesar 89,32 persen dari pagu tahun 2017 atau sebesar Rp62,10 triliun (termasuk pembayaran *carry over* 2016).

Guna mengawal angka target penyaluran DAK Fisik tahun 2018, Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan terus melakukan upaya percepatan dan ketepatan penyaluran DAK Fisik. Upaya tersebut dilakukan secara langsung ke pemerintah daerah melalui himbauan percepatan pelaksanaan DAK Fisik, ataupun melalui kerjasama dengan KPPN dan kementerian/Lembaga teknis.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun pada APBN 2018, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp96,84 triliun, atau 78,45 persen dari pagu alokasi dalam APBN 2018. Secara nominal, realisasi tersebut lebih tinggi Rp8,00 triliun bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp88,84 triliun.

Pada tahun 2018 telah dilakukan perbaikan penyaluran DAK Nonfisik, terutama Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG), yang sebelumnya disalurkan secara sekaligus, atau sesuai besaran persentase tertentu yang ditetapkan per triwulan, diubah penyalurannya menjadi berdasarkan kinerja pelaksanaan. Dengan demikian penyaluran kedua jenis DAK Nonfisik tersebut hanya dilaksanakan bagi daerah yang telah memenuhi kinerja penyerapan dana dan persyaratan pelaporan. Seiring dengan membaiknya pemahaman dan kedisiplinan pelaporan daerah, realisasi Dana BOK, BOKB, dan PK2UKM relatif lebih baik.

Untuk meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rekonsiliasi data, pemberitahuan melalui surat kepada daerah, dan kegiatan lainnya.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Pada APBN 2018, anggaran pagu DID ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun. Hingga 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran DID mencapai Rp8,07 triliun atau 94,96 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,50 triliun, atau 100 persen. Lebih rendahnya persentase realisasi penyaluran DID tersebut terutama disebabkan karena adanya perubahan pola penyaluran DID yang mensyaratkan adanya kinerja penyerapan dalam penyaluran tahap II, yang pada tahun sebelumnya tidak dipersyaratkan. Sebagaimana diketahui, penyaluran DID tahun 2018 dilakukan dalam

2 (dua) tahap. Penyaluran tahap I dilaksanakan paling cepat pada bulan Februari sebesar 50 persen dari pagu. Sedangkan penyaluran tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50 persen dengan persyaratan Pemda telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan penyerapan minimal 70 persen. Pemda menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap I tersebut paling lambat bulan Agustus.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Aceh, serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun. Sampai dengan 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai Rp14,32 triliun, atau 71,41 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp59,54 miliar dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,26 triliun.

Sementara itu, dari pagu Dana Keistimewaan pada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) sebesar Rp1,00 triliun, realisasinya sampai dengan 31 Oktober 2018 mencapai Rp0,80 triliun, atau 80,0 persen. Secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi Rp160 miliar dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,64 triliun.

D. DANA DESA

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp44,43 triliun, atau 74,05 persen dari pagu alokasi sebesar Rp60,00 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp47,52 triliun atau 79,20 persen dari pagu alokasi. Lebih rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa disebabkan karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran

Dana Desa Tahap III oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan PMK No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Selanjutnya dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III, Kementerian Keuangan akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagai syarat penyaluran Tahap III. Disamping itu, KPPN juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap III.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (YoY)
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Oktober 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.339,33	638.836,30	83,36	766.162,58	646.418,88	84,37
Transfer ke Daerah	706.339,33	591.313,80	83,72	706.162,58	601.991,26	85,25
A. Dana Perimbangan	678.596,04	568.908,66	83,84	676.602,99	578.794,95	85,54
1. Dana Transfer Umum	493.959,54	436.053,22	88,28	490.714,92	436.751,78	89,00
a. Dana Bagi Hasil	95.377,22	70.944,77	74,38	89.225,34	69.129,55	77,48
b. Dana Alokasi Umum	398.582,31	365.108,45	91,60	401.489,58	367.622,22	91,56
2. Dana Transfer Khusus	184.636,50	132.855,43	71,96	185.888,07	142.043,17	76,41
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,50	44.010,36	63,30	62.436,26	45.199,21	72,39
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,00	88.845,07	77,19	123.451,81	96.843,97	78,45
B. Dana Insentif Daerah	7.500,00	7.500,00	100,00	8.500,00	8.071,63	94,96
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,29	14.905,14	73,63	21.059,58	15.124,69	71,82
1. Dana Otsus	19.443,29	14.265,14	73,37	20.059,58	14.324,69	71,41
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7.971,65	6.016,95	75,48	8.029,79	6.022,34	75,00
b. Provinsi Aceh	7.971,65	6.016,95	75,48	8.029,79	6.022,34	75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3.500,00	2.231,25	63,75	4.000,00	2.280,00	57,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800,00	640,00	80,00	1.000,00	800,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	47.522,50	79,20	60.000,00	44.427,62	74,05



Foto:
Biro KLI/
Cahyo Afif

PEMBIAYAAN UTANG

Pembiayaan utang menunjukkan tren menurun, hingga akhir Oktober 2018 tumbuh negatif sebesar 19,59 persen yoy.

Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Oktober 2018 telah mencapai Rp333,72 triliun dari Rp399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut telah mencapai 83,59 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2018. Pertumbuhan realisasi pembiayaan utang sampai dengan Oktober 2018 sebesar negatif 19,53 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Realisasi Surat Berharga Negara(SBN) mencapai Rp343,23 triliun atau sebesar 82,80 persen dari jumlah yang ditetapkan pada APBN, sehingga pertumbuhan tahunan SBN lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 tumbuh sebesar negatif 16,64 persen. Sementara itu, Pinjaman (neto) ditetapkan sebesar negatif Rp15,30 triliun dalam APBN 2018, dimana sampai akhir Oktober 2018 terealisasi sebesar negatif Rp9,51 triliun atau mencapai 62,15 persen dari APBN 2018. Realisasi Pinjaman

	APBN 2018	Realisasi		% Growth (yoy)
		Okt 2018	% APBN	
Pembiayaan Utang	399,22	333,72	83,59	-19,59
1. Surat Berharga Negara (Neto)	414,52	343,23	82,80	-16,64
2. Pinjaman (Neto)	(15,30)	(9,51)	62,15	-417,78
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3,14	0,48	15,18	-67,86
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,50	1,45	32,31	71,22
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1,37)	(0,98)	71,77	72,90
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18,44)	(9,99)	54,15	-468,67
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51,35	48,57	94,59	-5,94
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69,79)	(58,51)	83,85	19,60

(neto) pada tahun 2018 ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dengan besaran penurunan sebesar 417,78 persen (yoy). Pinjaman terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Target Pinjaman Dalam Negeri yang ditetapkan sebesar Rp3,14 triliun, sampai dengan akhir Oktober 2018 realisasinya mencapai Rp476,40 miliar atau 15,18 persen dari APBN 2018 dengan perincian penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1,45 triliun sementara pembayaran cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp977,60 miliar.

Sementara itu Pinjaman Luar Negeri (Neto) ditetapkan sebesar negatif Rp18,44 triliun dengan rincian pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri ditetapkan sebesar Rp69,79 triliun dan penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp51,35 triliun. Sampai akhir Oktober 2018, penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) sebesar Rp48,57 triliun atau mengalami penurunan sebesar 5,94 persen (yoy), sedangkan untuk pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri telah terealisasi sebesar

Rp58,51 triliun atau sebesar 83,85 persen dari APBN 2018.

Pemerintah akan terus menjaga APBN 2018 agar tetap kredibel, aman dan terpercaya, tercermin dari semakin berkurangnya ketergantungan akan pinjaman terutama pinjaman Valuta Asing dan semakin kecilnya defisit anggaran Pemerintah. Lebih jauh lagi, sumber-sumber pembiayaan terus dikembangkan pemerintah seperti contohnya peluncuran *platform Sustainable Development Goals*. Platform ini merupakan sumber pembiayaan alternatif bagi berbagai proyek diantaranya proyek infrastruktur dan proyek pembangunan manusia. Selain itu, sampai akhir Oktober 2018 defisit anggaran belanja pemerintah mencapai 1,60 persen dari PDB, masih lebih rendah daripada yang ditetapkan di APBN 2018 yaitu sebesar 2,19 persen dari PDB. Sedangkan defisit keseimbangan primer mencapai negatif Rp23,76 triliun, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar negatif Rp87,33 triliun. Hal tersebut menunjukkan berbagai usaha pemerintah dalam mengawal APBN

(dalam Triliun Rupiah)

	Oktober -17		Oktober -18	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
Total Utang Pemerintah Pusat	3.893,60	100,00%	4.478,57	100,00%
a. Pinjaman	736,54	18,92%	833,92	18,62%
1. Pinjaman Luar Negeri	731,02	18,77%	827,57	18,48%
Bilateral	311,83	8,01%	334,63	7,47%
Multilateral	375,62	9,65%	446,94	9,98%
Komersial	42,62	1,09%	46,00	1,03%
Suppliers	0,96	0,02%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,52	0,14%	6,35	0,14%
b. Surat Berharga Negara	3.157,06	81,08%	3.644,65	81,38%
1. Denominasi Rupiah	2.304,68	59,19%	2.570,54	57,40%
Surat Utang Negara	1.930,42	49,58%	2.149,64	48,00%
Surat Berharga Syaria'ah Negara	374,26	9,61%	420,89	9,40%
2. Denominasi Valas	852,38	21,89%	1.074,12	23,98%
Surat Utang Negara	682,73	17,53%	838,10	18,71%
Surat Berharga Syaria'ah Negara	169,65	4,36%	236,02	5,27%
Grand Total	3.893,60	100,00%	4.478,57	100,00%
Debt to GDP as of Sep 2018			30,68%	
Asumsi PDB per september 2018			14,596,64	

agar tetap pada jalurnya.

Hingga akhir Oktober 2018, asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Rp14.596,64 triliun. Dengan jumlah PDB tersebut, rasio utang Pemerintah per akhir Oktober sebesar 30,68 persen.

Surat Berharga Negara mengalami pertumbuhan sebesar 15,44 persen year on year (yoy) sementara Pinjaman Luar Negeri yoy mengalami pertumbuhan sebesar 13,21 persen. Utang pemerintah dari Surat Berharga Negara maupun dari pinjaman Luar Negeri pada bulan Oktober ini (yoy) sama-sama mengalami pertumbuhan positif namun masih terkendali.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Pinjaman Luar Negeri untuk pembangunan Indonesia terutama sektor infrastruktur terus digalakkan salah satunya melalui pendalaman pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, khususnya memperluas basis investor ritel atau individu. Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah meluncurkan Sukuk Negara Tabungan yang kedua (seri ST-002) dengan masa penawaran 1 November 2018 hingga 22 November 2018. Inovasi yang dilakukan pemerintah untuk Sukuk Negara Tabungan seri ST-002 ini adalah semakin memudahkan pembelian

Sukuk Negara Tabungan melalui teknologi penjualan terkini yaitu masyarakat dapat membelinya secara online. Seri ST-002 ini dapat diperoleh dengan jumlah investasi yang relatif kecil yaitu Rp1.000.000,- per individu dengan imbal hasil 8,30 persen per tahun dan fasilitas *early redemption* setelah satu tahun sebanyak 50% dari jumlah yang diinvestasikan.

Melalui ST-002, Pemerintah mempunyai misi untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan Indonesia, sehingga dengan memiliki ST-002 serta Surat Berharga Negara lainnya, terutama seri ritel, akan terbangun "*sense of ownership*" serta "*sense of responsibility*" masyarakat Indonesia terhadap pembangunan negara kita.

Pemerintah juga mulai melibatkan perusahaan *Financial Technology* untuk memasarkan produk Surat Berharga Negara dalam menjangkau masyarakat dari gen Y atau milenial. Dengan demikian, melalui pengenalan sedari dini mengenai tujuan dan kegunaan dari penerbitan Surat Berharga Negara oleh Pemerintah diharapkan membangun semangat berinvestasi generasi tersebut untuk mendukung pembangunan dan kemajuan negara, sehingga sila ke-5 dari Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dapat terwujud.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Realisasi APBN s.d. 31 Oktober 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN

A. PENDAPATAN NEGARA

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN

a. Pajak Dalam Negeri

b. Pajak Perdagangan Internasional

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

II. HIBAH

B. BELANJA NEGARA

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1. Belanja K/L

2. Belanja Non /L

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

1. Transfer ke Daerah

2. Dana Desa

C. KESEIMBANGAN PRIMER

D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)

% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)

I. PEMBIAYAAN UTANG

II. PEMBIAYAAN INVESTASI

III. PEMBERIAN PINJAMAN

IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

V. PEMBIAYAAN LAINNYA

KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN

	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN
	1.736.060,1	1.239.026,6	71,37%	1.894.720,4	1.483.862,1	78,32%
	1.732.952,0	1.236.157,1	71,33%	1.893.523,5	1.476.096,4	77,96%
	1.472.709,9	1.001.658,8	68,01%	1.618.095,5	1.160.658,5	71,73%
	1.436.730,9	970.686,9	67,56%	1.579.395,5	1.122.732,9	71,09%
	35.979,0	30.971,9	86,08%	38.700,0	37.925,6	98,00%
	260.242,1	234.498,4	90,11%	275.428,0	315.437,9	114,53%
	3.108,1	2.869,5	92,32%	1.196,9	7.765,8	648,83%
	2.133.295,9	1.537.355,6	72,06%	2.220.657,0	1.720.847,8	77,49%
	1.366.956,6	898.519,2	65,73%	1.454.494,4	1.074.428,9	73,87%
	798.585,3	511.286,9	64,02%	847.435,2	586.372,4	69,19%
	568.371,3	387.232,2	68,13%	607.059,2	488.056,5	80,40%
	766.339,3	638.836,3	83,36%	766.162,6	646.418,9	84,37%
	706.339,3	591.313,8	83,72%	706.162,6	601.991,3	85,25%
	60.000,0	47.522,5	79,20%	60.000,0	44.427,6	74,05%
	(178.039,4)	(115.219,7)	64,72%	(87.329,5)	(23.764,0)	27,21%
	(397.235,8)	(298.328,0)		(325.936,6)	236.985,7	
	(2,92)	(2,21)		(2,19)	(1,60)	
	397.235,8	413.735,8	104,15%	325.936,6	320.007,1	98,18%
	461.343,6	414.717,8	89,89%	399.219,4	333.723,4	83,59%
	(59.733,8)	(3.500,0)	5,86%	(65.654,3)	(14.711,1)	22,41%
	(3.668,7)	2.178,8	-59,39%	(6.690,1)	838,4	-12,53%
	(1.005,4)	-	0,00%	(1.121,3)	-	0,00%
	300,0	339,3	113,10%	183,0	156,4	85,46%
	-	115.407,8		-	83.021,4	

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id/apbnkita